

ANALISIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM P2KP DI KOTA SEMARANG

(Studi Kasus Di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan
Kota Semarang Tahun 2000 - 2003)



TESIS

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S – 2

Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Dwi Prawani Sri Rejeki
C4B002233

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

Tesis

**ANALISIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM P2KP
DI KOTA SEMARANG**

(Studi Kasus Di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota
Semarang Tahun 2000 - 2003)

Oleh
Dwi Prawani Sri Rejeki
C4B002233

telah disetujui
oleh

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Drs. H. Basuki Suwardo, MS
Tanggal : 13 – 7 - 2006

Drs. Nugroho SBM, MT
Tanggal : 13 -7 - 2006

TESIS
ANALISIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI
IMPLEMENTASI PROGRAM P2KP
DI KOTA SEMARANG

(Studi Kasus Di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
Tahun 2000 - 2003)

disusun Oleh

Dwi Prawani Sri Rejeki
C4B002233

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 21 Juli 2006
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Penguji

Drs. H. Basuki Suwardo, MS

Dr. Syafrudin Budiningharto, SU

Pembimbing Pendamping

Drs. Nugroho SBM, MT

Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP

Dr. Waridin, MS

Telah dinyatakan lulus Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Tanggal
Ketua Program

Dr. Dwisetia Poerwono, MSc

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 13 Juli 2006

Dwi Prawani Sri Rejeki

Abstract

The Urban Poverty Project represents one of the Social Safety Net Programs in urban area which aims to overcome the poverty as the impact of economic crisis. The focus of this research is evaluated from the performance of Urban Poverty Project in Purwoyoso Village, Ngaliyan District, Semarang City in the year 2000 - 2003. The performance is evaluated from the relationship of guidance and working capital loans with income and savings as well as the difference between income and savings before and after the program.

The data analysis used in this research applies correlative analysis and variable test. From the calculation of the correlation coefficient (r), between the income and guidance, there is a positive correlation as much as 0,9932 which means that the income has a close relationship to guidance. While the determination coefficient (r^2) is equal to 0,9864 , which means that the income as much as 98,64% is determined by the guidance value, the rest as much as 1,36% is determined by onother factor. The calculation of correlation coefficient (r), between the income and loan there is a positive correlation as much as 0,9883 which means that the income has a close relationship to loan. The calculation of correlation coefficient (r), between the income and the savings as much as 0,9927 and the determination coefficient (r^2) is equal to 0,9855 , which means that the savings as much as 98,55% is determined by the income, while the rest as much as 1,45% is determined by onother factor. The calculation of correlation coefficient (r), between the guidance and the savings has correlation coefficient (r) as much as 0,9997, while the calculation of correlation coefficient (r) between the loan and the savings has correlation value as much as 0,9989. While the determination coefficient (r^2) is equal to 0,9534 , which means that the savings as much as 95,34% is determined by the loan , while the rest as much as 1,36% is determined by onother factor.

The result from the various test analysis shows that the average monthly income of the program participants after the program undergoes an increase to 76,53% , while the average monthly savings of the program participants undergoes an increase to 95,23%. This shows that there is a good will from the participants to be independent and self-supported in capitalization to manage their own business independently in the future. Accordingly, the success of the Urban Poverty Project to overcome poverty through providing loans can be achieved.

To increase more success on Urban Poverty Project to overcome poverty, it is better that the loans should be given to all productive poor society until the participants of the program can really be independent in capitalization.

ABSTRAKSI

Program P2KP merupakan salah satu program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di wilayah perkotaan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan akibat dampak krisis ekonomi. Fokus penelitian ini adalah kinerja pelaksanaan Program P2KP di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2000 – 2003 ditinjau dari hubungan pendampingan dan pinjaman modal dengan Pendapatan Usaha dan Simpanan Usaha, serta perbedaan Pendapatan Usaha dan Simpanan Usaha sebelum dan sesudah program.

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis korelasi dan uji beda. Dari hasil perhitungan koefisien korelasi (r) antara pendampingan dengan pendapatan usaha, ada korelasi positif sebesar 0,9932 yang berarti bahwa pendapatan usaha mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan pendampingan. Sedangkan koefisien determinasinya (r^2) = 0,9864, yang artinya bahwa pendapatan usaha sebesar 98,64% ditentukan oleh pendampingan, sisanya 1,36% ditentukan oleh faktor lain. Perhitungan koefisien korelasi (r) antara pinjaman modal dengan pendapatan usaha, ada korelasi positif sebesar 0,9883 yang berarti bahwa pendapatan usaha mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan pinjaman modal. Perhitungan koefisien korelasi (r) antara pendapatan usaha dengan simpanan usaha sebesar 0,9927 dan koefisien determinasinya (r^2) = 0,9855, yang artinya bahwa simpanan usaha sebesar 98,55% ditentukan oleh pendapatan usaha, sisanya sebesar 1,45% ditentukan oleh faktor lain. Perhitungan koefisien korelasi antara pendampingan dengan simpanan usaha nilai koefisien korelasinya sebesar 0,9997 sedang perhitungan koefisien korelasi antara pinjaman modal dengan simpanan usaha nilai koefisien korelasinya sebesar 0,9989. Sedangkan koefisien determinasinya (r^2) = 0,9534, yang artinya bahwa simpanan usaha sebesar 95,34% ditentukan oleh pinjaman modal dan sisanya 4,66% ditentukan oleh faktor lain. Dari hasil analisis uji beda memperlihatkan bahwa pendapatan usaha peserta program rata – rata per bulan sesudah program mengalami perubahan yang meningkat sampai 76,53%, sedang simpanan usaha peserta program rata – rata per bulan sesudah program mengalami perubahan yang meningkat sampai 95,23%, hal ini menunjukkan adanya kemauan dari peserta program berusaha untuk mandiri dalam permodalannya guna mengelola kegiatan usahanya secara mandiri di masa mendatang. Dengan demikian keberhasilan program P2KP dalam menanggulangi kemiskinan melalui pinjaman dana bergulir dapat terwujud.

Untuk lebih meningkatkan keberhasilan program P2KP dalam menanggulangi kemiskinan melalui pinjaman dana bergulir sebaiknya diberikan kepada seluruh warga miskin peserta program P2KP sampai benar – benar dapat mandiri dalam permodalannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala anugerah dan berkat-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Ucapan terima kasih dan penghargaan perlu disampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, pengarahan, saran, kemudahan, dan dukungan, sejak dimulainya penyusunan rancangan penelitian sampai selesainya penulisan tesis ini.

Teristimewa ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan sebesar – besarnya kepada :

1. Direktur Akademi Keuangan dan Akuntansi Wika Jasa Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang hingga selesai.
2. Bapak Dr. Dwisetia Poerwono, MSc, selaku Ketua Program Studi MIESP Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Drs.H. Basuki Suwardo, MS dan Bapak Drs. Nugroho SBM, MT yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran untuk membimbing dalam penulisan sejak awal hingga terselesainya tesis ini.
4. Bapak / Ibu Dosen Pengampu Program Studi MIESP Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

5. Bapak Kepala Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan Pengurus BKM “Warga Sejahtera” Kelurahan Purwoyoso serta anggota KSM peserta program P2KP yang telah banyak memberikan informasi yang sangat berarti bagi penulisan tesis ini.
6. Semua rekan – rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan semangat sehingga tesis ini dapat selesai.
7. Suami tercinta Drs.Widodo dan ketiga anak kami Mulyo Widhi Prasetio,ST , Riana Widya Prabawani dan Kurnia Winda Pratiwi.

Semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan merupakan amalan yang akan mendapatkan imbalan berlipat ganda.

Semarang, 13 Juli 2006

Penulis,

Dwi Prawani Sri Rejeki

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Batas, Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Di Jawa Tengah Tahun 1990 – 2002	5
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk, Penduduk Miskin dan Batas Miskin Menurut Kota di Jateng Tahun 2002 – 2004	6
Tabel 1.3. Jumlah Keluarga Miskin di Kota Semarang Tahun 2000 – 2003	6
Tabel 3.1. Pengelompokan Sampel	49
Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas Instrumen Pendampingan	53
Tabel 3.3. Pengujian Validitas Instrumen Pinjaman Modal	54
Tabel 3.4. Pengujian Validitas Instrumen Pendapatan Usaha	55
Tabel 3.5. Pengujian Validitas Instrumen Simpanan Usaha	56
Tabel 3.6. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen	57
Tabel 3.7. Hasil Analisis Persyaratan Normalitas	58
Tabel 3.8. Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi	61
Tabel 4.1. Komposisi Penduduk Kelurahan Purwoyoso menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	64
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kelurahan Purwoyoso menurut Kelompok Usia	65
Tabel 4.3. Komposisi Penduduk Kelurahan Purwoyoso menurut Tingkat Pendidikan	65
Tabel 4.4. Komposisi Penduduk Kelurahan Purwoyoso menurut Mata Pencaharian	66
Tabel 4.5. Bidang Pembangunan di Kelurahan Purwoyoso	67
Tabel 4.6. Pencairan Dana P2KP di Kelurahan Purwoyoso Tahun 2000 – 2002	71
Tabel 4.7. Perkembangan KSM dan Dana Bergulir Program P2KP di Kelurahan Purwoyoso (Tahun 2000 – 2004)	75
Tabel 4.8. Karakteristik Responden Penerima Pinjaman Dana P2KP di Kelurahan Purwoyoso menurut Jenis Pekerjaan	76
Tabel 4.9. Karakteristik Responden Penerima Pinjaman Dana P2KP di Kelurahan Purwoyoso menurut Jenis Usaha	77

Tabel 4.10.	Karakteristik Responden Penerima Pinjaman Dana P2KP di Kelurahan Purwoyoso menurut Jenis Kelamin	77
Tabel 4.11.	Karakteristik Responden Penerima Pinjaman Dana P2KP di Kelurahan Purwoyoso menurut Tingkat Pendidikan	78
Tabel 4.12.	Karakteristik Responden Penerima Pinjaman Dana P2KP di Kelurahan Purwoyoso menurut Umur	79
Tabel 4.13.	Karakteristik Responden Penerima Pinjaman Dana P2KP di Kelurahan Purwoyoso menurut Tenaga Kerja yang Dipekerjakan	80
Tabel 4.14.	Karakteristik Responden Penerima Pinjaman Dana P2KP di Kelurahan Purwoyoso menurut Lama Usaha	81
Tabel 4.15.	Karakteristik Responden Penerima Pinjaman Dana P2KP di Kelurahan Purwoyoso menurut Tanggungan Keluarga	81
Tabel 4.16.	Modal Usaha Yang Dimiliki Responden Peserta Program P2KP di Kelurahan Purwoyoso	85
Tabel 4.17	Penghasilan Keluarga Responden Peserta Program P2KP di Kelurahan Purwoyoso per Bulan	85
Tabel 4.18.	Tabungan Keluarga Responden Peserita Program P2KP di Kelurahan Purwoyoso per Bulan	86
Tabel 4.19.	Penambahan Aset Produktif Peserta Program P2KP Sesudah Program	87
Tabel 4.20.	Tahapan Keluarga Sejahtera di Kelurahan Purwoyoso	88
Tabel 5.1.	Keaktifan Faskel Dalam Pendampingan	90
Tabel 5.2.	Kemampuan Faskel Dalam Pendampingan	90
Tabel 5.3.	Tanggung Jawab Faskel Dalam Pendampingan	91
Tabel 5.4.	Materi Pendampingan	92
Tabel 5.5.	Hasil Uji Hipotesis: Perbedaan Pendapatan Usaha sebelum dan sesudah program	102
Tabel 5.6.	Hasil Uji Hipotesis: Perbedaan Simpanan Usaha sebelum dan sesudah program	103

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian	44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Instrumen Penelitian
- Lampiran 2 Sebaran Data Untuk Analisis
- Lampiran 3 Hasil Analisis SPSS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan dan Manfaat	12
II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS	14
2.1. Tinjauan Pustaka	14
2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis	43
2.3. Hipotesis	44
III METODE PENELITIAN	45
3.1. Definisi Operasional	45
3.2. Jenis dan Sumber Data	46
3.3. Populasi dan Sampel	47
3.4. Metode Pengumpulan Data	49
3.5. Skala Pengukuran	50
3.6. Teknik Analisis Data	51
3.7. Variabel penelitian	58
3.8. Analisis Data	58
IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	62
4.1. Diskripsi Kelurahan Purwoyoso	62
4.2. Diskripsi Pelaksanaan Program P2KP	70
4.3. Diskripsi Profil Responden	75
V HASIL DAN PEMBAHASAN	89
5.1. Diskripsi Kinerja Fasilitator Kelurahan	89
5.2. Analisis Korelasi	94
5.3. Uji Tanda Wilcoxon	101
VI PENUTUP	104
6.1. Kesimpulan	104
6.2. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

BIODATA

N a m a : Dra. Dwi Prawani Sri rejeki
Tempat / tgl lahir : Cepu, 15 Maret 1955
Pekerjaan : Dosen PNS dpk AKA WIKA JASA SEMARANG
Sejak Maret 1883 - sekarang.
Alamat Kantor : Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Ngisor Semarang
(Telp. 024 – 8314457)
Alamat Rumah : Jl. Wismasari I / 4 Ngaliyan Semarang
(Telp. 024 – 7601403)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri, hal ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan. Menurut Sondang P. Siagian (1999), pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju pada modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan menurut Bintoro (1988) bahwa pembangunan dapat diartikan pula sebagai suatu proses pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan yang dianggap lebih baik.

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesejahteraan umum/rakyat dapat ditingkatkan kalau kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/umum dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang dimulai sejak Pelita I sudah menjangkau seluruh pelosok tanah air dan telah menghasilkan perkembangan yang positif. Namun demikian, krisis moneter dan ekonomi yang melanda

Indonesia sejak tahun 1997 telah mengecilkan arti berbagai pencapaian pembangunan tersebut. Seperti halnya di Jawa Tengah, dimana program penanggulangan kemiskinan (Bina Usaha) yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program pemerintah (JPS, P3EMDN, PPIKM, P4K, PPKM, PPSP, PIK, IDT, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Usaha Ekonomi Desa, Program pengentasan kemiskinan daerah pantai, dan Program pemulihan keberdayaan masyarakat).
- b. Program penyertaan partisipasi masyarakat/dunia usaha (Takesra, Kukesra, KPKU Prokesra, dan Program kredit Taskin DAKAB/YDSM).
- c. Program Bantuan Luar Negeri (P2KP dan PPK).
- d. Skim Kredit (KUT, KKOP, KKRS/SS, KMKBPR/Syari'ah, KMKUKM, KPTTG, dan KPTPUD).

Upaya itu telah berhasil menekan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai jumlah 4.1 juta jiwa (13,91 %) tahun 1996. Namun setelah terjadi krisis sejak tahun 1997 telah berdampak negatif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan yang semula telah menunjukkan hasil, justru akumulasi penduduk miskin meningkat pada akhir tahun 1998 yakni 11,14 juta jiwa (36,70 %). Ini berarti terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin 22,79 % selama dua tahun atau sama dengan 7,04 juta jiwa (BPS, 2003).

Krisis tersebut pada satu sisi telah menimbulkan lonjakan pengangguran dan dengan cepat meningkatkan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Dengan semakin memburuknya keadaan ekonomi nasional menyebabkan masyarakat

berlomba - lomba untuk meningkatkan taraf kehidupannya, salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan dampak perpindahan penduduk dari desa ke kota ini adalah menekan penghasilan kota, selain itu juga mengakibatkan kemiskinan kota. Keadaan ini tidak bisa dibiarkan terus menerus karena kota akan menjadi semakin padat dan memunculkan permukiman kumuh, sedangkan kemampuan kota untuk menampung jumlah penduduk yang terus meningkat justru semakin menurun, sehingga menuntut adanya suatu program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan budaya agar jumlah penduduk miskin semakin berkurang.

Menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK, 2003) beberapa kelemahan upaya penanggulangan kemiskinan yang berjalan selama ini antara lain:

1. Program - program penanggulangan kemiskinan masih bersifat parsial, belum terpadu dan komprehensif.
2. Belum tersedianya instrumen upaya penanggulangan kemiskinan yang spesifik sesuai dengan keragaman dimensi permasalahan kemiskinan di setiap daerah.
3. Berbagai kebijakan yang semula diproyeksikan untuk mengatasi masalah kemiskinan pada kenyataannya melahirkan masalah baru, yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan.

4. Lemahnya birokrasi pemerintah, kecilnya peran masyarakat, LSM, tidak sinkronnya kebijakan pusat dan daerah, terhambatnya komunikasi pembuat program dengan *stakeholders*.

Sedang menurut Bappeda Propinsi Jawa Tengah (2003), kelemahan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di masa lalu antara lain :

1. Berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro.
2. Kebijakan terpusat.
3. Lebih bersifat karitatif.
4. Memposisikan masyarakat sebagai obyek.
5. Cara pandang tentang kemiskinan yang diorientasikan pada ekonomi.
6. Asumsi permasalahan dan penanggulangan kemiskinan yang sering dipandang sama.

Sehubungan dengan itu perlunya pola baru dalam penanganan kemiskinan yang lebih berorientasi pada kemandirian dan berkelanjutan upaya – upaya masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Oleh karena itu pemahaman tentang data kemiskinan sangat diperlukan untuk memberikan informasi kepada pengambil kebijakan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan.

Berbagai kondisi kemiskinan dapat dipresentasikan melalui berbagai jenis data baik data yang bersifat makro maupun data yang bersifat mikro (Bappenas 2003) :

1. Data makro, merupakan data agregat tentang jumlah dan persentase penduduk miskin dan variabel kemiskinan lainnya pada tingkat nasional dan wilayah

(propinsi dan kabupaten/kota). Sumber data makro sebagian besar bersumber dari BPS yang merupakan institusi yang menyediakan data dalam lingkup nasional.

2. Data mikro lebih bersifat operasional yang idealnya mampu menyajikan informasi siapa itu si miskin, dimana mereka berada, dan apa yang mereka lakukan, yang direkap dalam unit administrasi terendah (misalnya RT/RW atau desa/kelurahan). Data kemiskinan yang bersifat mikro ini lebih operasional dalam mengidentifikasi kelompok sasaran (seperti nama kepala keluarga, alamat dan status sosial – ekonomi tertentu).

Data kemiskinan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Batas, Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Di Jawa Tengah
Tahun 1990 – 2002

Tahun	Batas Miskin (Rp/kapita/bln)		Persentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (000 Orang)		
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota+ Desa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1990	18.648	12.267	22,00	15,83	17,49	1.585,3	3.330,1	4.915,4
1993	24.204	16.725	17,36	15,10	15,78	1.526,0	3.092,8	4.618,7
1996	40.075	30.499	20,67	22,05	21,61	1.973,4	4.444,2	6.417,6
1999	88.384	72.210	27,80	28,05	28,46	3.032,2	5.723,2	8.755,4
2002	121.461	97.310	20,50	24,96	23,06	2.762,3	4.546,0	7.308,3

Sumber : BPS Tahun 2003

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk, Penduduk Miskin dan Batas Miskin
Menurut Kota Di Jateng
Tahun 2002 - 2004

Kota	Jumlah Penduduk (000 orang)			Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)			Garis kemiskinan (Rp/Kap/Bln)		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004
Magelang	116,49	119,40	123,57	16,4	17,7	17,4	120.406	141.580	163.503
Surakarta	488,16	485,50	505,15	69,4	72,8	69,5	108.328	131.084	154.749
Salatiga	163,07	158,11	164,97	20,1	18,3	16,0	106.103	128.016	136.729
Semarang	1.455,99	1.389,41	1.406,23	103,4	91,8	79,0	111.696	124.653	133.814
Pekalongan	265,82	271,41	273,63	26,3	20,7	18,6	95.947	108.653	139.571
Tegal	238,05	242,11	240,78	31,7	23,1	23,1	115.809	137.953	167.621

Sumber : BPS Tahun 2005

Tabel 1.3
Jumlah Keluarga Miskin di Kota Semarang
Tahun 2000 - 2003

Tahun	Keluarga Miskin (Pra KS)	Keluarga Miskin I (KS I)	Pra KS + KS I	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Persentase Keluarga Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(4):(5)
2000	42.285	70.435	112.720	330.580	34,10
2001	42.119	70.946	113.065	329.082	34,36
2002	44.013	74.945	118.958	316.338	37,60
2003	44.358	77.797	122.155	322.734	37,85

Sumber : Pendataan Bappeda Kota Tahun 2003 (diolah)

Berdasarkan data di atas , masalah kemiskinan masih tetap relevan dan penting untuk dikaji dan diupayakan penanggulangannya, jika kelompok keluarga Pra KS dan kelompok keluarga KS I digunakan sebagai indikator kemiskinan.

Upaya Penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban moral, sosial, hukum maupun politik bagi bangsa Indonesia. Sila ke lima Pancasila menyebutkan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, dan apa usaha kita termasuk pejabat di pusat atau daerah, lembaga sosial, organisasi non pemerintah serta masyarakat, untuk mewujudkan sila tersebut ? Mengapa

kemiskinan masih terlihat dimana – mana, jelas kita belum berhasil mewujudkan sila tersebut.

Menurut Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) dan Lembaga Penelitian SMERU (2001), setidaknya ada empat aspek utama mengapa usaha penanggulangan kemiskinan menjadi penting bagi daerah maupun secara nasional, yaitu :

a. Aspek kemanusiaan :

Menjalankan misi kemanusiaan yang bersifat universal, yaitu memanusiakan manusia sesuai dengan hak azasi yang dimiliki;

- Agar kehidupan masyarakat semakin adil dan makmur.

b. Aspek ekonomi :

- Mengeluarkan penduduk dari belenggu keterbelakangan ekonomi;
- Mengubah orang miskin dari hanya sebagai beban masyarakat menjadi sumber daya manusia yang dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan daerah;
- Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia di daerah;
- Memberdayakan penduduk dalam memanfaatkan sumber daya sumber daya ekonomi serta mendukung kegiatan ekonomi produktif di daerah;
- Meningkatkan pendapatan penduduk, memperluas permintaan pasar dan mengembangkan transaksi ekonomi diberbagai pelosok daerah;
- Menciptakan keadilan dalam bentuk adanya pemerataan kesempatan memperoleh hasil pembangunan.

c. Aspek sosial dan politik

- Mengurangi kecemburuan sosial di tengah – tengah masyarakat yang sifatnya sangat majemuk;
- Meniadakan kerawanan sosial yang karena adanya usaha provokasi untuk tujuan tertentu yang dapat merugikan daerah dan negara secara luas;
- Menciptakan kondisi dimana pemerintah daerah akan menjadi lebih mudah merumuskan kebijakan karena adanya partisipasi aktif masyarakat;
- Menghapuskan kebodohan dan meningkatkan kehidupan yang lebih demokratis baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik.

d. Aspek keamanan

- Menciptakan kondisi sosial yang stabil dan damai, jauh dari konflik sosial dan politik yang meresahkan penduduk;
- Meningkatkan stabilitas keamanan dan menurunkan tingkat kriminalitas.

Untuk menanggulangi persoalan kemiskinan, maka pemerintah memandang perlu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di perkotaan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Bentuk pelaksanaan P2KP adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di perkotaan dalam bentuk pinjaman dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan masyarakat, baik yang sifatnya bergulir maupun hibah. Dana pinjaman P2KP merupakan dana pinjaman yang disalurkan kepada kelompok – kelompok swadaya masyarakat (KSM) secara langsung dengan sepengetahuan konsultan yang mengelola P2KP di suatu wilayah kerja,

sepengetahuan penanggung jawab operasional (PJOK) yang ditunjuk dan sepengetahuan warga masyarakat setempat melalui kelembagaan masyarakat yang dibentuk. Dana pinjaman tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal kerja suatu usaha produktif, pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan, serta pengembangan sumber daya manusia.

2. Memberikan bantuan teknis berupa pendampingan kepada masyarakat dalam rangka membantu pembentukan organisasi di tingkat komunitas, dan melakukan upaya bagi peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan ekonomi, perbaikan sarana dan prasarana lingkungan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian masyarakat mampu melakukan kegiatan - kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dalam rangka penanggulangan berbagai masalah kemiskinan yang dihadapi.

P2KP bertujuan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui hal – hal berikut :

1. Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru.
2. Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang butir 1 di atas.
3. Peningkatan kemampuan perorangan dalam keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha – usaha baru yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok.

4. Penyiapan, pengembangan dan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.
5. Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan.

Melalui program ini keluarga miskin (keluarga pra KS dan keluarga KS I dengan alasan ekonomi) ditumbuhkan minat dan gairahnya untuk berwirausaha dan dibantu untuk mengembangkannya, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan sosial ekonominya sesuai dengan tahapan keluarga sejahtera agar dapat lepas dari keterbelakangan sosial, ekonomi dan budaya.

Keinginan dan semangat meningkatkan usaha ini akan muncul manakala keluarga – keluarga yang bersangkutan memahami dengan pasti manfaat dana pinjaman dan pendampingan dari P2KP serta mendapatkan pada saat yang tepat dan dukungan lainnya yang memungkinkan keluarga tersebut mengembangkan potensinya. Dengan memahami arti dan manfaat dana pinjaman dan pendampingan dari P2KP yang disalurkan kepada mereka kemungkinan akan lebih efektif, jika dibandingkan apabila mereka kurang memiliki semangat berusaha dan belum memahami dengan pasti manfaat bantuan dana P2KP.

P2KP tahap 1- 1 di kota Semarang dilaksanakan di 57 Kelurahan dari 13 Kecamatan dan meliputi 2.699 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Dana pinjaman program P2KP yang diterimakan setiap kelurahan berkisar antara Rp.250 juta hingga Rp.750 juta tergantung luas wilayah, jumlah penduduk kelurahan dan pendapatan rata – rata (*income*) penduduk. Di Kecamatan Ngaliyan

Kota Semarang mulai pertengahan tahun 2000 mendapat program P2KP untuk empat kelurahan yaitu Kelurahan Purwoyoso, Kelurahan Ngaliyan, Kelurahan Wonosari dan Kelurahan Kedungpani. Sebagai realisasi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama bagi keluarga pra KS dan keluarga KS I, maka program P2KP di Kecamatan Ngaliyan khusus Kelurahan Purwoyoso sudah pada tahap 1 – 2 artinya dalam pelaksanaan P2KP tahap 1- 1 memiliki peluang untuk tidak terciptanya keberlanjutan dalam upaya - upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat.

Dari alasan tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari tahu sejauh mana keberhasilan pemanfaatan pinjaman dana dan pendampingan program P2KP dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan di perkotaan (Studi Kasus di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2000 - 2003).

1.2. Perumusan Masalah

Walaupun program – program penanggulangan kemiskinan telah diimplementasikan namun jumlah keluarga miskin semakin meningkat. Hal tersebut juga terlihat dari hasil pendataan pentahapan keluarga miskin oleh Bappeda Kota Semarang tahun 2003 dari jumlah 322.734 kepala keluarga 37,85% termasuk kelompok keluarga Pra KS dan kelompok keluarga KS I, tahun 2002 kelompok keluarga Pra KS dan kelompok keluarga KS I sebanyak 37,60%, tahun 2001 kelompok keluarga Pra KS dan kelompok keluarga KS I sebanyak 34,36%, dan tahun 2000 kelompok keluarga Pra KS dan kelompok keluarga KS I sebanyak 34,10%. Dari hasil pendataan tersebut terlihat bahwa penduduk miskin dari tahun

ke tahun semakin meningkat. Yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini mengapa beberapa program penanggulangan kemiskinan telah diimplementasikan namun jumlah keluarga miskin semakin meningkat, ini berarti efektifitas program tidak berjalan dengan baik. Salah satu penyebab dari hal tersebut diatas adalah kurang akuratnya data tentang kemiskinan dan jumlah penduduk miskin.

P2KP sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan di perkotaan, pada akhirnya keberhasilan program diukur sejauh mana tujuan dan manfaat upaya tersebut dapat dicapai dan dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin yang menjadi sasaran program. Berdasar pada latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Fakel Pendampingan Program P2KP ?
2. Apakah ada hubungan antara pendampingan dan pinjaman modal dengan pendapatan usaha ?
3. Apakah ada hubungan antara pendapatan usaha dengan simpanan usaha ?
4. Apakah ada hubungan antara pendampingan dan pinjaman modal dengan simpanan usaha ?
5. Apakah ada perbedaan pendapatan usaha dan simpanan usaha sebelum dan sesudah program ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

a. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana pinjaman dan pendampingan teknis program P2KP di wilayah Kelurahan Purwoyoso

Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dalam rangka pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera.

b. Tujuan Khusus

1. Mengevaluasi kinerja Faskel pendampingan program P2KP.
2. Menganalisis hubungan antara pendampingan dengan pendapatan usaha dan pinjaman modal dengan pendapatan usaha peserta program.
3. Menganalisis hubungan antara pendapatan usaha dengan simpanan usaha peserta program.
4. Menganalisis hubungan antara pendampingan dengan simpanan usaha dan hubungan antara pinjaman modal dengan simpanan usaha peserta program.
5. Menganalisis perbedaan pendapatan usaha sebelum dan sesudah program.
6. Menganalisis perbedaan simpanan usaha sebelum dan sesudah program.

c. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi:

1. Pengambil kebijakan dan keputusan mengenai Program P2KP agar dapat sesuai dengan kondisi riil dalam pelaksanaan serta dapat mengatasi hambatan – hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan program.
2. Masyarakat atau KSM dalam upaya pemanfaatan dana pinjaman program P2KP secara maksimal dalam rangka meningkatkan pendapatan usaha dan simpanan usaha yang mereka lakukan.
3. Bagi peneliti lain yang ingin meneliti hal yang sama sebagai penambah referensi dan wawasan dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pemahaman Tentang Kemiskinan

Menurut Spicker dan Gaiha, 1993 (dalam Tim Koordinasi Penyiapan Perumusan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, 2004) bahwa kemiskinan lebih tepat dipahami bersama – sama dengan masalah sosial lainnya, misalnya kelaparan, penyakit, pengangguran, kelebihan penduduk, perusakan lingkungan, akibat – akibat dari konflik sosial. Pandangan mengenai beragam dimensi masalah kemiskinan dan peluang penanggulangannya berakar dari kategorisasi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merujuk kepada tingkat minimum dan kehidupan subsisten agar manusia bisa memenuhi kebutuhan untuk hidup.

Badan Pusat Statistik (BPS), mendefinisikan kemiskinan dengan standar garis kemiskinan (*poverty line*) makanan dan non makanan. Garis kemiskinan makanan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan minimum non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian dan barang/jasa lainnya. BPS Jateng menetapkan garis kemiskinan pada tahun 2002 sebesar Rp. 121.461,-/kapita/bulan di perkotaan dan Rp. 97.310,-/kapita/bulan di pedesaan. Untuk kota Semarang ditetapkan garis kemiskinan pada tahun 2002 sebesar Rp. 111.696,-/kapita/bulan, tahun 2003 sebesar Rp. 124.653,-/ kapita/bulan, dan tahun 2004

sebesar Rp. 133.571,-/ kapita/bulan. Garis kemiskinan ini memiliki kesamaan dengan garis kemiskinan menurut Bank Dunia, yaitu diukur menurut pendapatan seseorang.

Sajogyo (dalam Mudrajad, 1997) menggambarkan tingkat penghasilan dengan mengukur pengeluaran setara beras per kapita per tahun untuk kategori : miskin perkotaan 480 kg dan pedesaan 320 kg , miskin sekali di perkotaan 360 kg dan pedesaan 240 kg, paling miskin di perkotaan 270 kg dan pedesaan 180 kg.

Sedangkan BKKBN, menggunakan satuan rumah tangga untuk mengukur tingkat kemiskinan. Kemiskinan berada pada keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS 1) yang ditandai oleh kesulitan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan non ekonomi. Disamping merujuk kepada individu dan rumah tangga penduduk miskin, ukuran kemiskinan juga didekati melalui pengamatan daerah miskin. Terdapat hubungan yang kuat antara wilayah miskin dengan penduduk miskin, sehingga dengan mengetahui wilayah miskin dapat diharapkan ditemui mayoritas penduduk miskin.

Kemiskinan perkotaan adalah suatu keadaan kekurangan yang dialami oleh sebagian orang di wilayah kota, baik di bidang ekonomi seperti kurangnya pendapatan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya kepemilikan aset produktif, tidak memiliki akses ke sumberdaya modal seperti kredit perbankan, di bidang sosial yang diindikasikan dengan kurangnya akses terhadap fasilitas dan kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat, maupun dibidang lingkungan yang diindikasikan dengan munculnya permukiman kumuh dan liar sehingga tidak sehat (Buku Pedoman KPK, 2003).

Sasaran program P2KP yaitu untuk mengatasi keadaan kekurangan di bidang ekonomi seperti kurangnya pendapatan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya kepemilikan aset produktif, tidak memiliki akses ke sumberdaya modal seperti kredit perbankan.

Bersamaan dengan bertambahnya pengetahuan tentang kemiskinan dan faktor – faktor penentunya, pada awal tahun 1990 definisi kemiskinan telah diperluas tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup ketidak mampuan di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Dipenghujung abad 20 telah muncul pengertian kemiskinan baru, yaitu bahwa disamping semua definisi di atas kemiskinan juga mencakup dimensi kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu definisi kemiskinan yang memadai harus mencakup pengertian kemiskinan yang memiliki berbagai dimensi (SMERU, 2001), antara lain :

- ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan);
- tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi);
- tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga);
- kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal;
- rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam;
- tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat;

- tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan;
- ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak – anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

2.1.2 Faktor – Faktor Penyebab Kemiskinan

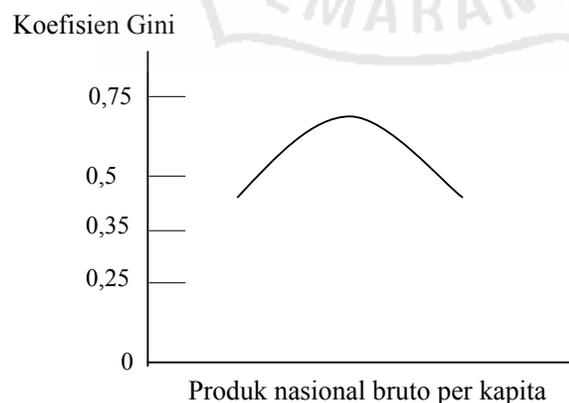
Sharp (dalam Mudrajad, 1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. **Pertama**, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. **Kedua**, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. **Ketiga**, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas, seterusnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima dan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya

investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya, logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (dalam Hutagalung, 1964).

Bagaimana dengan kasus di Indonesia ? Menurut KPK ada satu sisi dari kemiskinan yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah Indonesia sendiri. Peneliti akan menjelaskan fenomena ini dengan Hipotesa Kuznets, karena kita melihat adanya pola yang sama antara Hipotesis Kuznets dan kasus kemiskinan di Indonesia.

Kuznets yang melakukan analisa pola pertumbuhan historis di negara maju mengemukakan bahwa di tahap – tahap awal pertumbuhan, distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk. Observasi ini kemudian dikenal sebagai konsep Kurva Kuznets “U – terbalik” . Konsep tersebut memperoleh namanya dari bentuk rangkaian perubahan longitudinal (antar waktu) atas distribusi pendapatan (yang diukur berdasarkan Koefisien Gini) sejalan dengan pertumbuhan GNP per kapita (Todaro, 2000).



Dari grafik tersebut terlihat bahwa kurva Kuznets mempunyai sumbu tegak berupa Koefisien Gini yang merupakan ukuran ketidak merataan atau ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan agregat yang angkanya berkisar

antara nol (pemerataan sempurna) dan satu (ketimpangan sempurna), dan sumbu mendatarnya adalah *Gross National Product* (GNP) yang mencerminkan tingkat pertumbuhan suatu negara. Sehingga dapat dilihat apabila suatu negara sedang dalam masa awal pertumbuhan dan kemudian mengalami kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi, maka ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Koefisien Gini akan meningkat. Akan tetapi kemudian pada tahap – tahap berikutnya ketimpangan akan menurun menyesuaikan dengan tingkat pertumbuhan yang semakin tinggi. Inilah yang disebut dengan Hipotesa Kuznets.

Krisis di Indonesia telah menghancurkan semua fondamental ekonomi dan politik, termasuk pula prestasi – prestasi yang telah diraih dan membawa Indonesia pada titik awal pembangunan bangsa. Krisis ini menyebabkan pertumbuhan Indonesia menjadi 13,6 persen pada tahun 1998 dari 8 persen pada tahun 1996. Sementara neraca keuangan negara yang defisit karena jatuhnya nilai tukar dan jatuh temponya sejumlah besar hutang, baik dalam ataupun luar negeri Indonesia. Selain itu kondisi sosial politik di Indonesia yang menjadi tidak stabil menyebabkan pemulihan ekonomi berjalan lambat dan meleset dari target. Sehingga kemudian dalam berbagai transisi pemerintah, program pemerintah diarahkan pada bagaimana memulihkan perekonomian Indonesia untuk menggnjot tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berbagai program dan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah mulai menampakkan hasilnya pada tahun – tahun selanjutnya, tingkat pertumbuhan mulai merangkak naik, akan tetapi peningkatan – peningkatan di era ini ternyata mempunyai *side effect* pula seperti yang terjadi dalam Hipotesa Kuznets, yaitu

terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Yang tercermin dari semakin meningkatnya jumlah penduduk golongan miskin dari tahun ke tahun seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Dan yang menyebabkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia di era pasca krisis ini berubah adalah kondisi dan karakteristik pembangunan di Indonesia itu sendiri. Kondisi dan karakteristik yang mendorong terjadinya *side effect* pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Novianto Wibowo, 2000) adalah :

1. Kebijakan pemerintah yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi;
2. Sistem pajak yang belum baik;
3. Terbatasnya Keuangan Negara;
4. Belum adanya sistem subsidi yang efektif dan efisien;
5. Pembangunan yang dilaksanakan belum berdemensi gender.

Menurut Lembaga penelitian SMERU, 2001, penyebab dasar kemiskinan antara lain :

- kegagalan kepemilikan, terutama tanah dan modal;
- terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;
- kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor;
- adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;
- adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antar sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);
- rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;

- budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungan;
- tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*);
- pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Kenyataan kasat mata yang juga didukung oleh suara mereka yang miskin menunjukkan bahwa kemiskinan disebabkan (SMERU, 2001) :

1. Keterbatasan pendapatan, modal dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar termasuk:
 - modal sumberdaya manusia, misalnya pendidikan formal, keterampilan, dan kesehatan yang memadai;
 - modal produksi, misalnya lahan, dan akses terhadap kredit;
 - modal sosial, misalnya jaringan sosial dan akses terhadap kebijakan dan keputusan politik;
 - secara fisik, misalnya akses terhadap prasarana dasar seperti jalan, air bersih, listrik
 - termasuk hidup di daerah yang terpencil.
2. Kerentanan dan ketidakmampuan menghadapi goncangan – goncangan karena:
 - krisis ekonomi;
 - kegagalan panen karena hama, banjir, atau kekeringan;
 - kehilangan pekerjaan (PHK);
 - konflik sosial dan politik;

- korban kekerasan sosial dan rumah tangga;
 - bencana alam (longsor, gempa bumi, perubahan iklim global);
 - musibah (jatuh sakit, kebakaran, kecurian atau ternak terserang wabah penyakit);
3. Tidak adanya suara yang mewakili dan terpuruk dalam ketidakberdayaan di dalam institusi negara dan masyarakat karena :
- tidak ada kepastian hukum;
 - tidak ada perlindungan dari kejahatan;
 - kesewenang – wenangan aparat;
 - ancaman dan intimidasi;
 - kebijakan publik yang tidak peka dan tidak mendukung upaya penanggulangan kemiskinan;
 - rendahnya posisi tawar masyarakat miskin.

2.1.3. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Strategi penanggulangan kemiskinan (SPK) sangatlah penting bagi daerah, karena akan menjadi acuan bagi semua pelaku baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerahnya.

SPK Daerah adalah dokumen resmi yang berisi kesepakatan – kesepakatan antar *stakeholders* daerah (pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) untuk bersama – sama mengatasi masalah kemiskinan sesuai kondisi masing - masing daerah. Dokumen strategi ini berorientasi pada proses (bukan sekedar hasil), menyeluruh (*komprensif*) dan berdemensi jangka menengah dan jangka panjang.

Dua Strategi Utama Penanggulangan Kemiskinan :

1. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas, dimana masyarakat miskin memiliki kemampuan pengelolaan, memperoleh peluang dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial budaya maupun politik;
2. Mengurangi pengeluaran melalui pengurangan beban kebutuhan dasar seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi.

Strategi Utama Penanggulangan Kemiskinan dijabarkan kedalam 4 pilar langkah kebijakan yang menjadi acuan bagi *stakeholders* dalam proses penyusunan *poverty reduction strategy papers* (PRSP) adalah sebagai berikut :

1. Perluasan kesempatan, yakni pemerintah bersama sektor swasta dan masyarakat menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
2. Pemberdayaan masyarakat, yakni pemerintah, sektor swasta dan masyarakat memberdayakan masyarakat miskin agar dapat memperoleh kembali hak – hak ekonomi, sosial dan politiknya, mengontrol keputusan yang menyangkut kepentingannya, menyalurkan aspirasi, dan mampu secara mandiri mengatasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi;
3. Peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, yakni pemerintah, sektor swasta dan masyarakat meningkatkan kapasitas atau kemampuan dasar masyarakat miskin agar mampu bekerja berusaha secara lebih produktif, dan memperjuangkan kepentingannya;

4. Perlindungan sosial, yakni pemerintah melalui kebijakan publik mengajak sektor swasta dan masyarakat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin, utamanya kelompok masyarakat yang paling miskin (fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, cacat) dan kelompok masyarakat miskin yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial.

2.1.4. Pengertian Sumber Daya Manusia dan ruang Lingkup

Menurut Afrida (2003), sumber daya manusia (*human resources*) mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, sumber daya manusia (SDM) menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengertian SDM tersebut mengandung (1) aspek kuantitas dalam arti jumlah penduduk yang mampu bekerja, dan (2) aspek kualitas dalam arti jasa kerja tersedia dan diberikan untuk produksi. Pengertian diatas juga menegaskan bahwa SDM mempunyai peranan sebagai faktor produksi. Sebagaimana faktor – faktor yang lain, Ekonomi Sumber Daya Manusia berusaha menerangkan bagaimana memanfaatkan SDM sebaik – baiknya untuk dapat menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan masyarakat.

2.1.5. Pentahapan Keluarga Sejahtera.

Konsep “sejahtera” dirumuskan lebih luas dari pada sekedar definisi kemakmuran ataupun kebahagiaan. Oleh karena itu, konsep “sejahtera” tak hanya mengacu pada pemenuhan kebutuhan fisik orang atau keluarga sepintas, tetapi juga kebutuhan psikologis mereka. Ada tiga kelompok kebutuhan yang harus dipenuhi, yakni kelompok – kelompok kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, dan kebutuhan pengembangan.

Pembangunan keluarga sejahtera mencakup 12 variabel, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, agama, keluarga berencana, interaksi dengan lingkungan, transportasi, tabungan, informasi dan peranan dalam masyarakat.

Dalam rumusan lima tahap Keluarga Sejahtera di bawah ini, masing – masing kelompok keluarga memiliki ciri yang berbeda, seperti yang dijelaskan pada Petunjuk Pelaksanaan Takesra bagi Kader edisi 2 (1998) :

1. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, dan kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera tahap I, yaitu keluarga - keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psylogical needs*), seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.

3. Keluarga Sejahtera tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang di samping telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan perkembangan (*development needs*), seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
4. Keluarga Sejahtera tahap III, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan perkembangannya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakatnya, seperti secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, serta berpartisipasi secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan, dan sebagainya.
5. Keluarga Sejahtera tahap III plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik bersifat dasar, sosial psikologis, maupun yang bersifat pengembangan, serta telah dapat pula memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Program P2KP diperuntukkan bagi keluarga pra KS dan keluarga KS I sebagai berikut :

1. Keluarga pra KS dengan alasan ekonomi kreterianya :
 - a. Tidak mampu makan 2 kali sehari.
 - b. Bagian lantai yang terluas dari tanah.
 - c. Anggota keluarga tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah atau bekerja dan bepergian.

2. Keluarga KS I dengan alasan ekonomi kreterianya :

- a. Tidak mampu mengkonsumsi protein seminggu sekali.
- b. Setahun terakhir anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 stel pakaian baru.
- c. Lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni.

Pembangunan keluarga sejahtera diharapkan bisa mencapai tahapan Keluarga Sejahtera III Plus. Dalam rangka melaksanakan pembangunan keluarga sejahtera tersebut, pemerintah mengitrodusir program P2KP yang pelaksanaannya dimulai akhir tahun 1999.

2.1.6. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan sebagai Proyek

P2KP adalah singkatan dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. P2KP merupakan salah satu proyek nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi berbagai persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan (*urban*). Pemerintah Indonesia selanjutnya menugaskan Direktorat Jendral Perumahan dan Permukiman – Departemen Kimpraswil sebagai pelaksana proyek (*executing agency*) dari P2KP.

P2KP sebagai suatu “proyek” merupakan suatu upaya pemerintah yang bermuara pada “program” penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui strategi pemberdayaan (*empowerment*) sebagai investasi modal sosial (*social capital*) menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Artinya “proyek” yang diprakarsai pemerintah ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadi “program” penanggulangan kemiskinan yang tumbuh

atas inisiatif dan prakarsa masyarakat sendiri, dan didukung oleh pemerintahnya maupun kelompok – kelompok peduli, organisasi - organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha yang ada.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang didukung oleh Bank Dunia dalam kegiatannya memberikan peluang besar pada peran serta masyarakat, dari tingkat pengambilan keputusan dan pelaksanaan, mempunyai sasaran lebih nyata untuk mengentaskan penduduk miskin di perkotaan. Program ini merupakan penajaman dari program penanganan masalah perkotaan sebelumnya yang ada. Penajaman dan dukungannya proyek ini terutama untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin kota dan memperkuat lembaga institusi lokal yang ada. Maksud penanggulangan adalah untuk mencegah penambahan dan mengurangi jumlah penduduk miskin di perkotaan. Kegiatan utama proyek adalah membiayai usaha – usaha yang memberikan manfaat kepada masyarakat miskin kota di kelurahan yang telah ditetapkan. Biaya – biaya yang dikeluarkan Proyek berupa pinjaman modal kerja bergulir kepada perorangan atau keluarga miskin sebagai modal bagi peningkatan pendapatan yang berkelanjutan.

Tujuan P2KP adalah membiayai kegiatan – kegiatan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat miskin di kelurahan sasaran, melalui :

1. Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru.
2. Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang butir 1 di atas.

3. Peningkatan kemampuan perorangan dalam keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha – usaha baru yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok.
4. Penyiapan, pengembangan dan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.
5. Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan.

Kelompok sasaran masyarakat yang ingin disentuh melalui P2KP, yaitu :

1. Masyarakat kelurahan, yaitu seluruh masyarakat kelurahan dengan penerima manfaat langsung adalah keluarga miskin (sesuai dengan rumusan kriteria kemiskinan setempat yang disepakati warga).
2. Pemerintah daerah, yaitu perangkat pemerintahan dari tingkat kota/kabupaten, kecamatan hingga kelurahan.
3. Para pihak terkait lainnya, yaitu seluruh pihak terkait di luar kelompok masyarakat kelurahan sasaran dan aparat pemerintahan daerah seperti : Perbankan, LSM, Perguruan Tinggi setempat, Lembaga – lembaga keuangan (misalnya : BRI) dll.

P2KP dilaksanakan melalui strategi – strategi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan konsep Tridaya (pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan lingkungan).

2. Pemberian dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan, serta pinjaman dana bergulir untuk modal kerja kegiatan produktif.
3. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat membuka peluang usaha baru.
4. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat agar inisiatif mereka dapat ditumbuhkan dan diwujudkan.
5. Pendampingan pada KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).

Prinsip – prinsip yang dijunjung tinggi, ditumbuh - kembangkan dan dilestarikan dalam pelaksanaan P2KP adalah : 1) Demokrasi, 2) Partisipasi, 3) Transparansi, 4) Akuntabilitas, 5) Desentralisasi.

Komponen proyek dan sub proyek yang didanai oleh P2KP dapat dikelompokkan atas :

1. Komponen Fisik, meliputi pemeliharaan, perbaikan, maupun pembangunan baru prasarana dan sarana dasar lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat kelurahan setempat.
2. Komponen kegiatan ekonomi skala kecil, yang dimaksud meliputi kegiatan industri rumah tangga atau kegiatan usaha skala kecil lainnya yang dilakukan oleh perseorangan / keluarga miskin yang menghimpun diri dalam suatu KSM. Tidak ada batasan terhadap jenis usaha yang dapat memperoleh kredit tambahan modal usaha, kecuali : pembebasan lahan, pendepositoan uang di lembaga keuangan, produksi / penjualan obat – obatan terlarang, senjata dan

barang – barang berbahaya bagi lingkungan, serta pembiayaan administrasi pemerintah.

3. Komponen Pelatihan.

Kegiatan pelatihan dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan warga di kelurahan sasaran. Pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial ini dimaksudkan untuk mendukung upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, termasuk disini adalah magang (kredit mikro dapat diminta untuk membayar sebagian upah) dan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan mengelola lembaga. Contoh : pelatihan tata buku.

Struktur Organisasi yang ada dalam pelaksanaan P2KP, dibentuk tim koordinasi pada beberapa tingkatan, yaitu :

- Di tingkat pusat dibentuk Tim Koordinasi P2KP yang terdiri atas unsur – unsur: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Departemen Keuangan (Depkeu), Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Departemen permukiman dan Pengembangan Wilayah, dan departemen lainnya yang terkait.
- Untuk keperluan operasional dan administrasi, Tim Koordinasi P2KP Pusat membawahkan Sekretariat P2KP Pusat yang terdiri atas unsur – unsur departemen terkait.
- Pengelolaan proyek dilakukan oleh Project Management Unit (PMU), yang dibentuk di Instansi Pelaksana, yaitu Departemen permukiman dan Pengembangan Wilayah. Untuk administrasi proyek, PMU dibantu oleh

Pemimpin Proyek. Untuk membantu koordinasi dan pengelolaan P2KP pada tingkat pusat, dipilih lembaga konsultan melalui suatu lelang terbuka yang disebut sebagai konsultan manajemen pusat (KMP).

- Pada tingkat wilayah, ditempatkan KMW yang masing – masing menangani satu SWK (satuan wilayah kerja). KMP dan KMW terikat secara kontraktual dengan Pimpro.
- Pada tingkat kelurahan, dikembangkan badan keswadayaan masyarakat (BKM) yang merupakan kelembagaan masyarakat yang beranggotakan tokoh masyarakat, perwakilan KSM dan warga kelurahan. BKM selanjutnya membentuk UPK (unit pengelola keuangan) yang diketuai oleh bendahara BKM. Sangat dianjurkan, ketua UPK adalah seorang perempuan yang dipilih dari organisasi kerja efektif (OKE) setempat seperti kelompok PKK.
- Penerima bantuan adalah kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau kelompok usaha bersama (Kube) yang terdiri atas perorangan dan atau keluarga miskin.
- Untuk membantu, mendorong dan mengarahkan kegiatan KSM di kelurahan sasaran, disiapkan sejumlah pendamping yang disebut fasilitator kelurahan (Faskel) adalah perangkat KMW yang melakukan pendampingan baik kepada KSM maupun pada institusi setempat seperti BKM

Dalam pelaksanaan P2KP dikembangkan beberapa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai bahan untuk mengenali permasalahan pelaksanaan proyek secara dini. Tolok ukur kinerja P2KP didasarkan pada aspek – aspek masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), dan dampak.

Tolok ukur aspek masukan meliputi antara lain :

1. jumlah kelurahan yang mendapat bantuan, dan
2. jumlah fasilitator menurut ukuran layanan terhadap jumlah penduduk penerima bantuan.

Tolok ukur aspek keluaran meliputi antara lain :

1. jumlah usulan yang diajukan,
2. persentase usulan yang disepakati untuk dibiayai,
3. pengembalian pinjaman per tahapan,
4. modal awal (persentase dari kewajiban),
5. bunga (persentase dari kewajiban),
6. persentase penyelesaian pekerjaan, dan
7. audit, jumlah kelurahan terpilih.

Tolok ukur aspek dampak, meliputi antara lain :

1. tingkat kepuasan penerima bantuan,
2. persentase jumlah orang yang diteliti, yang mengetahui keberadaan proyek,
3. persentase jumlah orang yang diteliti, yang merasa puas dengan keberadaan proyek, dan
4. adanya pertumbuhan peningkatan jumlah modal yang berputar di kelurahan sasaran.

Untuk menjadikan tolok ukur tersebut sebagai satu indikator pengukur keberhasilan proyek, ditetapkan besaran yang selanjutnya dapat dikembangkan oleh pihak – pihak yang berkepentingan. Keberhasilan program P2KP akan dapat dilihat dengan kondisi dimana strategi dan pendekatan tersebut benar – benar

telah dapat dicapai dan diimplementasikan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok – kelompok peduli setempat. Keberhasilan program P2KP dilihat dari pemanfaatan bantuan dana pinjaman program P2KP dengan indikator – indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya usaha dan mudah dalam mengakses (kemampuan menghimpun) modal.
2. Timbulnya usaha bersama di tingkat desa.

2.1.7. Konsep Pendampingan

Menurut ISEI (1998), pendampingan merupakan sebuah instrumen *social engineering* dalam praktek pembangunan masyarakat. Pendampingan adalah suatu kegiatan pemberdayaan yang dilakukan bersama – sama antara pendamping dengan yang didampingi. Menurut Chamsiah Djamal (1994), pendekatan dalam proses pendampingan juga harus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan masyarakat, karena yang dibutuhkan selama waktu pendampingan adalah mengembangkan tingkat pengetahuan dan kesadaran kelompok partisipan untuk usaha mandiri. Menurut TKP3 KPK, 2004, pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan aset dan kemampuan masyarakat miskin agar mau dan mampu mengakses berbagai sumberdaya, permodalan, teknologi dan pasar dengan pendekatan pendampingan, peningkatan kapasitas, pelayanan dan pembelaan menuju kemandirian masyarakat. Sedangkan menurut Wardah Hafidz, dkk, 1995, pendampingan adalah : (a) Memberikan motivasi kepada pihak yang didampingi. (b) Melakukan fasilitasi dan mediasi sumberdaya yang ada di masyarakat. (c) Menyampaikan informasi dari dan

kepada pihak yang didampingi. (d) Melakukan advokasi pada kelompok yang didampingi terhadap para pengambil kebijakan atau pembuat regulasi dan stakeholder terkait lainnya.

Pendampingan tidak akan pernah berhasil manakala tidak ada niat atau kemauan dari dalam diri partisipan yang didampingi yang mencoba mempengaruhi seluruh perilaku diri sendiri. Pendamping hanya mampu memotivasi tetapi hasil akhir akan bergantung dari diri partisipan yang didampingi. Oleh karenanya, karakteristik pendampingan adalah dilakukan secara khusus berdasarkan kasus per kasus (Tulus Tambunan, 1998).

2.1.8. Usaha Ekonomi Produktif

Menurut Gunawan (1997), yang dimaksud dengan usaha ekonomi produktif adalah kegiatan usaha yang dikelola sendiri oleh anggota dan kelompok sehingga dapat menguntungkan, berkembang, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, unit usaha ekonomi produktif ini berkisar pada pengolahan, pemrosesan produk dan pemasaran produk. Karena modal usaha yang dimiliki relatif kecil, maka unit usahanya pun berada dalam skala yang kecil pula.

Jenis – jenis kegiatan yang dilakukan dalam usaha ekonomi produktif, misalnya : candak kulak, industri kecil/industri rumah tangga, pengembangan jasa pelayanan, perdagangan dan usaha ekonomi produktif lainnya. Namun demikian , unit usaha ini tetap harus memiliki manajemen pemasaran yang baik agar usaha yang dilakukan dapat berkembang secara optimal.

Hendrawan (1992) mengungkapkan tentang strategi pemasaran produk - produk unit usaha ekonomi produktif agar dapat berkembang harus memperhatikan hal - hal berikut :

1. Konsep pemasaran yang benar adalah “produksilah apa yang bisa dijual” bukan “juallah apa yang bisa diproduksi”. Hal ini berarti pemasaran harus bertolak dari kebutuhan masyarakat (kebutuhan pasar) bukan bertolak dari kebutuhan pabrik (produk).
2. Konsumen sebenarnya membeli apa yang dapat diberikan oleh suatu produk. Karena itu tujuan suatu bisnis/usaha adalah bagaimana menciptakan dan mempertahankan konsumennya.
3. Konsumen yang puas adalah medium atau alat promosi terbaik bagi unit usaha, dan keluhan konsumen harus dipandang sebagai kesempatan baru bagi unit usaha untuk bertambah maju.

Dalam mengembangkan kewirausahaan, adanya kegiatan - kegiatan keluarga yang berupa pelaju (petik, olah, jual dan untung), pemaju (proses, kemas, jual dan untung), dan penguja (pengembangan usaha jasa) sebagai unit - unit usaha ekonomi produktif yang bisa dikembangkan oleh keluarga penerima dana program P2KP. Sedangkan indikator keberhasilan dari unit - unit usaha ekonomi produktif tersebut adalah meningkatnya penghasilan yang diperoleh.

2.1.9. Tingkat Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan tentang definisi pendapatan, yaitu : Pendapatan adalah hasil berupa uang atau jasa manusia bebas (Winardi,

1986). Sedangkan Sumitro (1986), mengartikan pendapatan sebagai setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari suatu usaha yang dapat dicapai untuk menambah kekayaan dalam bentuk apapun. Hadibroto (1982) memberikan definisi pendapatan sebagai hasil yang diperoleh dengan penjualan barang atau jasa dan jumlahnya diukur dengan pembebanan yang dilakukan atas pembelian, klien atau penyewa barang atau jasa yang diserahkan kepada mereka.

b. Jenis – jenis pendapatan

Pendapatan dalam masyarakat dapat dikategorikan menjadi tiga golongan, yaitu:

- (1) pendapatan pokok, yaitu pendapatan yang diperoleh dari upah sebagai kerja pokok;
- (2) pendapatan tambahan, yaitu pendapatan yang diperoleh di luar pendapatan pokok;
- (3) pendapatan lain – lain, yaitu pendapatan yang diperoleh selain pendapatan tambahan (Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, dalam Herawati, 1998).

c. Sumber pendapatan

Untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang dibutuhkan adanya pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran. Seorang individu dapat memperoleh pendapatan dengan jalan bekerja maupun dengan harta benda yang dimilikinya, misalnya tanah, mesin, rumah atau yang lazim disebut dengan barang

modal, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh pendapatan identik dengan menjual jasa – jasa atau barang – barang.

Adapun sumber - sumber pendapatan bila dilihat dapat diketahui berasal dari berbagai sumber. Hal ini seperti dijelaskan dalam Undang – undang Pajak Pendapatan pasal 2b tentang pengertian pendapatan, yaitu gunggungan jumlah uang atau nilai uang yang selama tahun takwin diperoleh seseorang sebagai hasil dari : uang dan tenaga; barang tak bergerak; harta bergerak; dan hak atas bayaran berkala (Sumitro, 1978).

Jadi kaitannya dengan tingkat pendapatan di dalam penelitian ini adalah lebih berfokus pada sumber pendapatan keluarga dari hasil usaha dan tenaga, yaitu dengan menjalankan usaha ekonomi produktif.

2.1.10. Penelitian Terdahulu

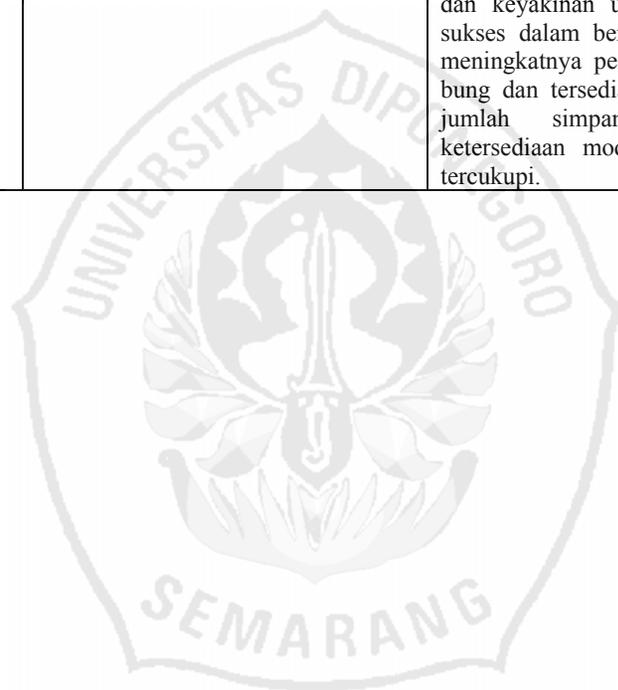
Sebagian yang diutarakan sebelumnya bahwa selain teori yang dibahas juga dilakukan pengkajian terhadap hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan para peneliti. Pengkajian atas hasil-hasil penelitian terdahulu akan sangat membantu dalam menelaah masalah-masalah yang dibahas dengan berbagai pendekatan-pendekatan spesifik. Selain itu dengan mempelajari hasil penelitian terdahulu akan memberikan pemahaman komprehensif mengenai posisi peneliti. Penegasan posisi ini sangat penting untuk membedakan penelitian peneliti dengan peneliti-peneliti terdahulu yang sudah dilakukan. Oleh karena itu pada bagian berikut ini akan diketengahkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan.

Ringkasan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan peneliti, yaitu sebagai berikut :

No	Judul/Lokasi/Tahun/Peneliti	Metodologi & Alat Analisis	Kesimpulan	Saran
1	Tingkat Keberhasilan Pemanfaatan Kukesra Bagi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Wilayah Propinsi Jawa Tengah, 1999 oleh BKKBN Propinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan IKIP Negeri Semarang.	Multi Cluster Area Random Sampling. Analisis kualitatif & Statistik diskriptif.	Secara kuantitatif untuk mengukur keberhasilan pemanfaatan Kukesra amat sulit, karena ada berbagai faktor kualitatif yang melingkupi (faktor internal dan faktor eksternal). Sedang faktor internal yang menghambat keberhasilan pemanfaatan Kukesra : tenaga kerja yang tidak profesional serta lemahnya pemasaran produk, sedang faktor eksternal yang menghambat keberhasilan pemanfaatan Kukesra : pencairan Kukesra tahap berikutnya cukup lama dan kurang terjalin hubungan kemitraan .	<ul style="list-style-type: none"> - Seleksi permohonan Kukesra harus diarahkan bagi keluarga yang berhak menerima. - Semua institusi yang terkait dengan program Kukesra hendaknya secara riil membantu mencarikan alternatif yang dibutuhkan peserta program untuk kelangsungan usaha ekonomi produktif yang dijalankan, serta perlu peningkatan pemahaman dan pengetahuan bagi pengelola program. - Perlu mitra usaha dengan intitusi perbankan lain untuk kelancaran pelayanan Kukesra.
2	Efektifitas Penggunaan Dana Kukesra (Studi Kasus Pada Kelompok UPPKS Kelurahan Ngemplak Simongan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang), 2000 oleh Tri Yanto.	Proporsional Random Sampling. Analisa Diskriptip dan Analisa Regresi	Hasil yang diperoleh yaitu peluang usaha, resiko bisnis, pemasaran hasil produksi dan ketrampilan manajemen secara bersama - sama memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan dana Kukesra. Efektivitas dalam penggunaan dana KUKESRA berpengaruh pula terhadap peningkatan pendapatan.	Guna meningkatkan efektivitas penggunaan dana KUKESRA masa yang akan datang, maka pemerintah perlu menyusun konsep yang jelas terutama sasaran yang ingin dicapai dan jumlah kredit perlu ditingkatkan.

No	Judul/Lokasi/Tahun/Peneliti	Metodologi & Alat Analisis	Kesimpulan	Saran
3	Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran di Propinsi D.I. Jogjakarta, 2003 oleh Awan Santosa,dkk.	Random Sampling . Analisis program dengan metode ESCAP (<i>Economic and Social Commision for Asian and Pacific</i>).	Indikator yang menunjukkan kemajuan dan prestasi penanggulangan kemiskinan bersasaran, yaitu indikator yang merupakan prioritas (<i>income indicator</i> dan <i>poverty reduction</i>), bahwa pelaksanaan program kerja mandiri lebih berhasil dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah sampel dibanding program padat karya. Secara keseluruhan program padat karya tidak dapat digunakan sebagai alat untuk penanggulangan kemiskinan. Hasil penelitian tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam tingkat pendapatan dan tingkat kemiskinan, karena pelaksanaan program terlalu pendek.	Perlu diperhitungkan seberapa besar manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari proyek yang dibangun, hal ini dapat dilakukan dengan evaluasi proyek secara lebih mendalam dengan memasukkan variabel terkait. Sistiem nilai sosial yang kondusif bagi pelaksanaan program padat karya bisa dijadikan sebagai indikator keberhasilan program padat karya dalam pembangunan masyarakat.
4	Pendampingan Perempuan Pedagang Pasar Tradisional Melalui Kredit Mikro (Studi Kasus Koperasi Bagor Semarang), 2005 oleh Piet Budiono.	Quasi Experimental dengan teknik control group. Uji Statistik non parametrik.	Progam pendampingan berhasil meningkatkan : kualitas gizi keluarga melalui penambahan pengeluaran untuk biaya konsumsi makanan dan meningkatkan upaya kehidupan masa depan, pendapatan usaha dan keuntungan, kemandirian bakul melalui kepercayaan diri,	Kebijakan Pemerintah yang peduli kepada UMK selain pemberian kredit modal kerja juga perlu memberikaan kemudahan mengakses dan fasilitas pendampingan usaha serta membantu peningkatan kesejahteraan keluarga masyarakat yang dilayani Bakul.

No	Judul/Lokasi/Tahun/Peneliti	Metodologi & Alat Analisis	Kesimpulan	Saran
			<p>keterampilan mengelola usaha dan keyakinan untuk mencapai sukses dalam berusaha. Dengan meningkatnya perilaku menabung dan tersedianya akumulasi jumlah simpanan sehingga ketersediaan modal kerja lebih tercukupi.</p>	



2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis

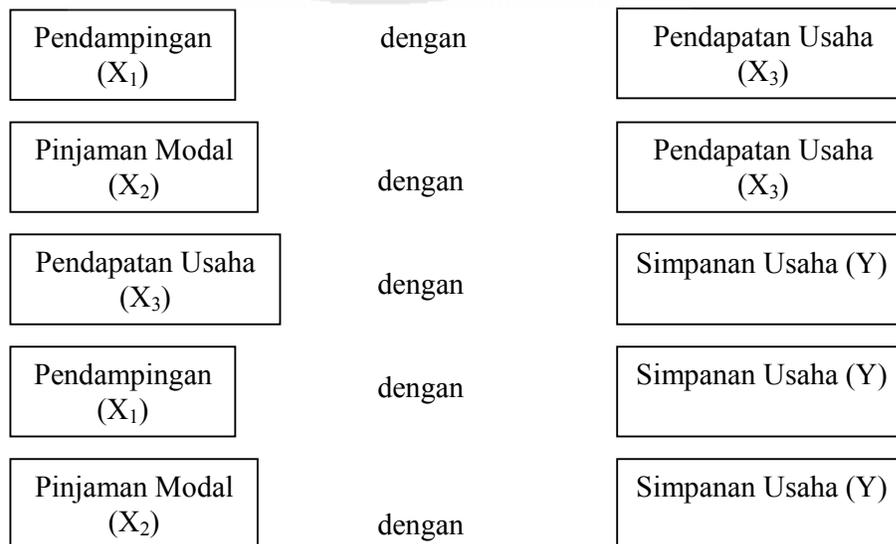
Agar penelitian ini terarah sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ditetapkan serta berdasarkan kiblat teoritis, maka perlu terlebih dahulu disusun kerangka pemikiran dalam melaksanakan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Awan dkk (2003), yaitu tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran, dengan jenis data primer. Namun dalam penelitian ini hanya satu program yang akan dianalisis yaitu program P2KP, dengan alasan bahwa Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dilaksanakan untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan di perkotaan dengan kegiatan utama Proyek adalah membiayai usaha – usaha yang memberikan manfaat kepada masyarakat miskin kota di kelurahan yang ditetapkan, dimana sasaran akhir dari program P2KP adalah menjadikan peserta program untuk dapat mandiri dalam permodalannya.

Dalam penelitian ini akan membandingkan pendapatan usaha dan simpanan usaha penerima program sebelum mengikuti program dengan setelah mengikuti program apakah ada peningkatan atau tidak. Apabila ada peningkatan berarti penerima program dapat memanfaatkan bantuan program dengan baik dalam meningkatkan usahanya, sehingga nantinya apabila sudah keluar dari program akan dapat berusaha sendiri secara mandiri. Bantuan program yang diberikan tersebut berupa pinjaman modal kerja bergulir sebagai modal bagi peningkatan kegiatan usaha ekonomi produktif (intensifikasi usaha dan ekstensifikasi usaha) serta pendampingan teknis yang diperlukan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk dapat membuka peluang usaha baru. Dengan

bantuan program tersebut diharapkan pendapatan usaha peserta program dapat meningkat, dengan meningkatnya pendapatan usaha diharapkan simpanan usaha juga meningkat, yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga peserta program. Dengan meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga peserta program diharapkan tingkat kemiskinan akan menurun atau masalah kemiskinan dapat ditanggulangi. Untuk memantau keberhasilan usaha tersebut perlu diadakan pengukuran, dari hasil pengukuran tersebut akan dapat diketahui pinjaman modal kerja P2KP dapat dimanfaatkan, dan juga menemukan faktor – faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat ditetapkan berbagai upaya untuk meningkatkan usaha tersebut. Pengukuran dilaksanakan atas aspek usaha yang meliputi : permodalan, laba yang diperoleh, volume penjualan, jumlah sumber daya manusia (tenaga kerja), pembukuan usaha dan kelancaran angsuran pinjaman.

Kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Model I : Korelasi



Model II : Uji Beda

<u>Sebelum</u>	<u>Sesudah</u>
Pendapatan Usaha (X_3)	Pendapatan Usaha (X_3^1)
Simpanan Usaha (Y)	Simpanan Usaha (Y^1)

2.3. Hipotesis

- H₁ : Ada korelasi antara pendampingan dengan pendapatan usaha peserta program.
- H₂ : Ada korelasi antara pinjaman modal dengan pendapatan usaha peserta program.
- H₃ : Ada korelasi antara pendapatan usaha dengan simpanan usaha peserta program.
- H₄ : Ada korelasi antara pendampingan dengan simpanan usaha peserta program.
- H₅ : Ada korelasi antara pinjaman modal dengan simpanan usaha peserta program.
- H₆ : Ada beda pendapatan usaha peserta program sebelum dan sesudah program.
- H₇ : Ada beda simpanan usaha peserta program sebelum dan sesudah program.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional Variabel :

1. Pendampingan adalah suatu proses kegiatan konsultasi dan pelatihan usaha selama masa pendampingan. Konsultasi adalah proses kegiatan tanya jawab informal seputar masalah usaha, sedang pelatihan adalah proses kegiatan peningkatan kapasitas atau ketrampilan mengelola usaha yang dilaksanakan secara formal dan informal. Pelatihan secara formal dilaksanakan pada waktu pelaksanaan LWK (latihan wajib kumpul) dengan materi pelatihan yang utama adalah manajemen sederhana pengelolaan usaha dan pencatatan keuangan usaha sederhana, disamping materi lain seperti mengatur keuangan keluarga, mencari dan membeli barang dagangan yang murah dan bagus dan lain – lain, sedang pelatihan informal adalah kunjungan ke tempat usaha sesama pedagang, wisata dan lain – lain. Kegiatan konsultasi dan pelatihan usaha dilakukan pada waktu penyelenggaraan latihan wajib kumpul (LWK) dua kali tiap bulan atau disesuaikan dengan kebutuhan peserta program, dengan lama kegiatan antara 30 – 60 menit setiap kegiatan. Pendampingan diukur dengan aktivitas, kemampuan, tanggung jawab, materi.
2. Pinjaman modal, yaitu pinjaman modal kerja bergulir yang digunakan untuk mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif (Ekstensifikasi usaha yaitu penambahan jenis usaha dan Intensifikasi usaha, yaitu penambahan omset usaha dalam usaha yang sama) keluarga peserta program yang

terhimpun dalam kelompok swadaya masyarakat. Besarnya pinjaman untuk satu KSM mulai Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp.23.500.000,- tergantung jenis usaha dan kebutuhan anggotanya, dengan bunga 1,5 persen per bulan dan diangsur selama 18 bulan. Setiap KSM terdiri minimal 3 anggota keluarga yang mempunyai usaha ekonomi produktif dan hanya diberi kesempatan mendapat pinjaman dana dari program P2KP satu kali. Dana pinjaman diukur dengan informasi, kemudahan, jumlah pinjaman, angsuran, bunga dan manfaat.

3. Pendapatan usaha adalah jumlah rupiah yang diterima dari hasil penjualan barang dagangan yang dihitung dengan cara menjumlahkan total omset/hasil penjualan barang dagangan (jumlah barang/jasa yang terjual dikalikan dengan harga per satuan) selama satu bulan dikurangi total biaya usaha selama satu bulan.
4. Simpanan usaha adalah jumlah rupiah yang disimpan secara rutin secara harian/mingguan oleh peserta program yang dihitung selama satu bulan sebagai sumber modal usaha selanjutnya.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Menurut Supranto (2000), sumber data yang diperoleh dalam penelitian yaitu: a) Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri langsung dari obyeknya. b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan

responden (peserta program) untuk memperoleh informasi jawaban responden mengenai data keluarga, data usaha dan data sikap pribadi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data base dari instansi terkait, seperti Bappeda Kota Semarang; Badan Pusat Statistik Semarang dan Jawa Tengah; Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang; BKM “Warga Sejahtera” Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang; Referensi dan lain - lain.

3.3. Populasi dan Sampel .

3.3.1. Populasi Penelitian.

Populasi (*universe*) adalah totalitas dari semua obyek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (Hasan, 2001).

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kelompok swadaya masyarakat (keluarga Pra KS dan keluarga KS1 alasan ekonomi) peserta program di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sejak tahun 2000 – 2003 berjumlah 44 kelompok swadaya masyarakat (KSM) dengan jumlah anggota 205 keluarga.

Kegiatan ekonomi peserta program dalam penelitian ini terdiri dari 3 kelompok usaha yaitu :

Usaha Perdagangan (105 keluarga) terdiri dari :	Usaha Jasa (70 keluarga) terdiri dari :	Usaha Industri RT (30 keluarga) terdiri dari :
- Kelontong - Buah - Aneka Ush - Blanja - Sembako	- Transportasi - Bengkel - Konveksi/Penjahit - Ahli Kunci - Catering/Wr Mkn - Kosipa - Persewaan Alat Pesta - Foto Copy	- Rempeyek - Krupuk - Telur Asin - Tempe - Roti Kering - Kerajinan

3.3.2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara – cara tertentu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap dapat mewakili populasi tersebut (Hasan, 2001). Mengingat bahwa populasi dalam penelitian ini relatif cukup besar ada 205, sedangkan disisi lain terdapat keterbatasan tenaga maupun waktu dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan dengan memilih sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan atas dasar penentuan ukuran sampel mengikuti rumus yang dikemukakan oleh Solvin (dalam Husein Umar, 1999), sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir atau diinginkan dan dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 10 %.

$$\text{Jumlah sampel (n)} = \frac{205}{1 + 205 \cdot (0,1)^2} = \frac{205}{1 + 2,05} = 67,2 \text{ (dibulatkan menjadi 67)}$$

Teknik pengambilan sampel (*teknik sampling*) yang digunakan dalam penelitian ini dengan sampel secara acak, karena populasi dalam penelitian ini bersifat heterogen (usaha ekonomi produktif dengan berbagai jenis usaha) dan jumlah sampelnya ada 67 responden yang diambil secara *proporsional random sampling*, semua anggota dalam kelompok diberi nomor urut 001, 002,, 205. Pemilihan

sampel pada tiap kelompok dilakukan dengan menggunakan tabel bilangan random. Pengambilan sampel dari masing – masing kelompok dengan perhitungan sebagai berikut :

$$1. \text{ Usaha perdagangan} = \frac{105}{205} \times 67 = 34,32 \text{ dibulatkan menjadi } 35.$$

$$2. \text{ Usaha jasa} = \frac{70}{205} \times 67 = 22,88 \text{ dibulatkan menjadi } 22.$$

$$3. \text{ Usaha industri rumah tangga} = \frac{30}{205} \times 67 = 9,80 \text{ dibulatkan menjadi } 10.$$

Tabel 3.1
PENGELOMPOKAN SAMPEL

Kelompok	Jenis Usaha	Jumlah	Sampel	%
I	Perdagangan	105	35	52,24
II	J a s a	70	22	32,84
III	Industri Rumah Tangga	30	10	14,92
Jumlah		205	67	100,00

Sumber : BKM “Warga Sejahtera” Kelurahan Purwoyoso, 2005, diolah.

3.4. Metode Pengumpulan Data.

Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan metode pengumpulan data :

1. Kuesioner yang disampaikan kepada responden anggota sampel sesuai dengan keadaan responden yang bersangkutan. Kuesioner yang digunakan adalah daftar pertanyaan yang sudah disiapkan untuk dijawab oleh responden tentang dirinya sendiri. Pertanyaan dalam kuesioner sudah disusun menggunakan jawaban tertutup dengan lima (5) jawaban alternatif pilihan. Kuesioner yang telah siap disampaikan sendiri oleh peneliti dengan memerlukan waktu sekitar dua minggu.

2. Wawancara dengan responden kunci dan para pembina yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Mereka yang diwawancarai adalah sebagian dari responden pada saat pengambilan kuesioner atau saat menyerahkan kuesioner, para pembina kelurahan dan pengurus BKM setiap saat data dibutuhkan.
3. Observasi di lapangan, yaitu pengamatan langsung pada saat para anggota atau responden penerima program melaksanakan kegiatan usahanya. Observasi dilakukan bersamaan dengan penyerahan kuesioner, sedangkan yang diobservasi adalah usaha yang dilakukan.
4. Dokumentasi, yaitu dengan melihat data dari beberapa dokumen yang dimiliki oleh para responden atau ketua kelompok usaha serta para pembina di tingkat kelurahan yang berhubungan dengan program P2KP.

3.5. Skala Pengukuran :

Item – item variabel dalam penelitian ini disusun menggunakan skala Likert untuk setiap item pertanyaan dengan lima alternatif jawaban, maka skor jawabannya bergerak dari 1 sampai 5. Dalam skala Likert disebutkan bahwa semakin tinggi skor atau nilai yang diperoleh, maka individu tersebut mempunyai sikap yang positif atau mendukung dan sebaliknya semakin rendah skor atau nilai yang diperoleh, maka individu tersebut mempunyai sikap yang negatif atau tidak mendukung. Setiap variabel diukur rentang skalanya yaitu setiap item pertanyaan menggunakan skala berjenjang, yaitu :

- a. Kategori untuk jawaban sangat tinggi diberi skor 5
- b. Kategori untuk jawaban tinggi diberi skor 4

- c. Kategori untuk jawaban cukup tinggi diberi skor 3
- d. Kategori untuk jawaban rendah diberi skor 2
- e. Kategori untuk jawaban sangat rendah diberi skor 1.

Teknik Analisis Data

3.6.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian.

1. Pengujian Validitas Instrumen Penelitian.

Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menguji tiap faktor yang dibentuk oleh instrumen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan analisis faktor yang terdapat dalam *SPSS for windows*. Analisis faktor ini digunakan karena merupakan teknis analisis statistik yang mampu menggambarkan hubungan antar item yang terdapat dalam setiap faktor dalam setiap variabel.

Analisis faktor layak digunakan dalam suatu analisis apabila persyaratan indeks KMO (*Kaiser Meyer Olkin of Sampling Adequacy*) yang ada dalam instrumen memenuhi persyaratan (Norusis, 1988), sebagai berikut :

- a) Indeks KMO mendekati 1,00 dikategorikan baik sekali.
- b) Indeks KMO mendekati 0,80 dikategorikan baik.
- c) Indeks KMO mendekati 0,70 dikategorikan cukup.
- d) Indeks KMO mendekati 0,60 dikategorikan sedang.
- e) Indeks KMO mendekati 0,50 dikategorikan buruk.

Selain itu ada persyaratan yang harus dipenuhi adalah taraf signifikansi pada indeks *Barlett Test of Sphericity* (BTS) tidak lebih dari 0,05. Sedangkan kriteria penentu suatu item memiliki validitas yang baik apabila : (1) muatan faktor $> 0,71$ (varian 50 %) tergolong amat baik; (2) muatan faktor $> 0,63$ (varian 40 %)

tergolong baik; (3) muatan faktor $> 0,55$ (varian 30 %) tergolong cukup; (4) muatan faktor $> 0,45$ (varian 20 %) tergolong sedang; (5) muatan faktor $< 0,32$ (varian 10 %) tergolong kurang baik.

Sejalan dengan pendapat diatas, Comrey (Tirka, 1994) menyatakan kriteria untuk memasukkan suatu butir ke dalam suatu faktor ditentukan secara *arbitrary*, dengan persyaratan : (1) besarnya muatan faktor minimal 0,3200; (2) muatan faktor tidak ambigius, artinya butir tertentu tidak mempunyai unsur muatan faktor ganda.

Mengacu pada kriteria diatas, maka dalam analisis faktor ini penentuan validitas suatu butir pada faktor tertentu, peneliti mempertimbangkan dengan seksama terutama keberadaan butir pada dimensi tertentu. Selain itu analisis faktor ini penentuan batas muatan faktor adalah sebesar 0,3200. Pemilihan ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan validitas yang dimiliki oleh butir tersebut setidaknya – tidaknya sudah termasuk dalam kelompok sedang. Hal ini tentunya akan memberikan tingkat validitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

1.1. Pengujian Validitas Instrumen Pendampingan (X_1)

Variabel pendampingan dalam penelitian ini diungkap dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 18 item. Setiap item terdiri atas 5 option, dengan pemberian skor setiap option mulai 1 untuk jawaban a sampai 5 untuk jawaban e. Option yang mendukung diberi skor 5 sedangkan yang tidak mendukung diberi skor 1.

Berdasarkan hasil uji coba diperoleh hasil indek KMO sebesar 0,69119 dan *Barlett Test of Sphericity* sebesar 82,19632 dengan signifikansi sebesar 0,000.

Hasil analisis faktor yang tercermin dalam faktor matrix dapat dilihat, semua item memiliki muatan faktor yang lebih besar dari 0,3200, hal ini dapat diartikan semua item dalam instrumen pendampingan memenuhi persyaratan validitas. Hasil analisis ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Hasil Uji Validitas Instrumen Pendampingan (X₁)

Nomor	No. Item	Muatan Faktor	Keterangan
1	1	0,723	Validitas sangat baik
2	2	0,723	Validitas sangat baik
3	3	0,460	Validitas sedang
4	4	0,746	Validitas sangat baik
5	5	0,733	Validitas sangat baik
6	6	0,369	Validitas sedang
7	7	0,475	Validitas sedang
8	8	0,619	Validitas cukup baik
9	9	0,755	Validitas sangat baik
10	10	0,743	Validitas sangat baik
11	11	0,588	Validitas cukup baik
12	12	0,648	Validitas baik
13	13	0,576	Validitas cukup baik
14	14	0,589	Validitas cukup baik
15	15	0,497	Validitas sedang
16	16	0,604	Validitas cukup baik
17	17	0,538	Validitas sedang
18	18	0,684	Validitas baik

Sumber : Diolah dari instrumen Pendampingan (X₁)

1.2. Pengujian Validitas Instrumen Pinjaman Modal (X_2)

Variabel pinjaman modal (dana) dalam penelitian ini diungkap dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 8 item. Setiap item terdiri atas 5 *option*, dengan pemberian skor setiap *option* mulai 1 untuk jawaban a sampai 5 untuk jawaban e. *Option* yang mendukung diberi skor 5 sedangkan yang tidak mendukung diberi skor 1.

Berdasarkan hasil uji coba diperoleh hasil indek KMO sebesar 0,61909 dan *Barlett Test of Sphericity* sebesar 46,40932 dengan signifikansi sebesar 0,0113.

Hasil analisis faktor yang tercermin dalam faktor matrix dapat diperhatikan, 7 item memiliki muatan faktor yang lebih besar dari 0,3200 dan 1 item memiliki muatan faktor yang lebih kecil dari 0,3200, hal ini dapat diartikan bahwa 7 item dalam instrumen pinjaman modal memenuhi persyaratan validitas sedang 1 item dalam instrumen pinjaman modal kurang memenuhi persyaratan validitas. Hasil analisis ini dapat diperhatikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.
Pengujian Validitas Instrumen Pinjaman Modal (X_2)

Nomor	No. Item	Muatan Faktor	Keterangan
1	19	0,751	Validitas sangat baik
2	20	0,493	Validitas sedang
3	21	0,570	Validitas cukup baik
4	22	0,590	Validitas cukup baik
5	23	0,702	Validitas baik
6	24	0,662	Validitas baik
7	25	0,594	Validitas cukup baik
8	26	0,559	Validitas cukup baik

Sumber : Diolah dari instrumen Pinjaman Modal (X_2)

1.3. Pengujian Validitas Instrumen Pendapatan Usaha (X_3)

Variabel pendapatan usaha dalam penelitian ini diungkap dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 4 item. Setiap item terdiri atas 5 *option*, dengan pemberian skor setiap *option* mulai 1 untuk jawaban a sampai 5 untuk jawaban e. *Option* yang mendukung diberi skor 5 sedangkan yang tidak mendukung diberi skor 1.

Berdasarkan hasil uji coba diperoleh hasil indek KMO sebesar 0,64835 dan *Barlett Test of Sphericity* sebesar 25,04505 dengan signifikansi sebesar 0,000.

Hasil analisis faktor yang tercermin dalam faktor matrix dapat diperhatikan, semua item memiliki muatan faktor yang lebih besar dari 0,3200, hal ini dapat diartikan bahwa semua item dalam instrumen pendapatan usaha memenuhi persyaratan validitas. Hasil analisis ini dapat diperhatikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.
Pengujian Validitas Instrumen Pendapatan Usaha (X_3)

Nomor	No. Item	Muatan Faktor	Keterangan
1	27	0,898	Validitas sangat baik
2	28	0,801	Validitas sangat baik
3	29	0,872	Validitas sangat baik
4	30	0,837	Validitas sangat baik

Sumber : Diolah dari instrumen Pendapatan Usaha (X_3)

1.4. Pengujian Validitas Instrumen Simpanan Usaha (Y)

Variabel simpanan usaha dalam penelitian ini diungkap dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 2 item. Setiap item terdiri atas 5 *option*, dengan pemberian skor setiap *option* mulai 1 untuk jawaban a sampai 5 untuk jawaban e. *Option* yang mendukung diberi skor 5 sedangkan yang tidak mendukung diberi skor 1.

Berdasarkan hasil uji coba diperoleh hasil indek KMO sebesar 0,60760 dan *Barlett Test of Sphericity* sebesar 37,31972 dengan signifikansi sebesar 0,000.

Hasil analisis faktor yang tercermin dalam faktor matrix dapat diperhatikan, semua item memiliki muatan faktor yang lebih besar dari 0,3200, hal ini dapat diartikan bahwa semua item dalam instrumen pendapatan usaha memenuhi persyaratan validitas. Hasil analisis ini dapat diperhatikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Pengujian Validitas Instrumen Simpanan Usaha (Y)

Nomor	No. Item	Muatan Faktor	Keterangan
1	31	0,959	Validitas sangat baik
2	32	0,914	Validitas sangat baik

Sumber : Diolah dari instrumen Simpanan Usaha (Y)

2. Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian

Uji coba reliabilitas instrumen dalam suatu penelitian perlu dilakukan, karena keterandalan instrumen berkaitan dengan keajekan dan taraf kepercayaan terhadap instrumen penelitian tersebut. Menurut Tukman (dalam Suhadi, 2000) menguji keterandalan alat ukur sama dengan menguji taraf konsistensinya. Instrumen ini masing – masing memiliki pilihan jawaban berjenjang lebih dari 2 (dua) pilihan, maka pengujian keterandalan instrumen digunakan program *SPSS for Windows* dengan formula Koefisien Alpha.

Penentuan tingkat reliabilitas instrumen penelitian ini didasarkan kepada pendapat Fernandes (dalam Suhadi, 2000) yang menyatakan bahwa “reliabilitas suatu instrumen dapat diterima apabila memiliki koefisien minimal 0,50”, hal ini

mengandung pengertian bahwa suatu instrumen dapat digunakan sebagai alat pengumpul data yang andal apabila memiliki koefisien reliabilitas minimal 0,50.

Berdasarkan hasil analisis uji coba instrumen penelitian diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Nomor	Variabel	Koefisien	Keterangan
1	Pendampingan (X_1)	0,8981	Reliabilitas sangat tinggi
2	Pinjaman Modal (X_2)	0,7444	Reliabilitas sangat tinggi
3	Pendapatan Usaha (X_3)	0,8646	Reliabilitas sangat tinggi
4	Simpanan Usaha (Y)	0,8336	Reliabilitas sangat tinggi

Sumber : Diolah dari instrumen penelitian

3.6.2. Uji Normalitas Masing – masing Variabel

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas sebaran data setiap variabel dalam penelitian ini digunakan teknik analisis dengan komputer dengan memanfaatkan program SPSS versi 10. Penentuan normalitas setiap variabel didasarkan pada nilai skewness dari setiap variabel yaitu apabila $p \geq 0,05$ dan batas toleransi $\alpha = 0,05$. Anto Dayan (1989) menyebutkan apabila suatu data memiliki skewness kurang dari 0,05, maka dikategorikan dapat memiliki distribusi normal.

Hasil perhitungan komputer data keempat variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
Hasil Analisis Persyaratan Normalitas

Nomor	Variabel	Skewness	Keterangan
1	Pendampingan	0,1780	Normal
2	Pinjaman Modal	0,1790	Normal
3	Pendapatan Usaha	0,1940	Normal
4	Simpanan Usaha	0,0900	Normal

Sumber : Diolah dari instrumen penelitian

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai skewness setiap variabel berada dibawah 0,5 , hal ini berarti bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki distribusi normal.

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel, yaitu :

- 1) Variabel pendampingan (X_1)
- 2) Variabel pinjaman modal (X_2)
- 3) Variabel pendapatan usaha (X_3)
- 4) Variabel simpanan usaha (Y).

3.8. Analisis Data

Sesuai dengan sifat masalah dan tujuan yang terkait dalam penelitian ini, maka teknik analisis data akan dilakukan dengan dua (2) jenis teknik analisis sebagai berikut :

3.8.1. Analisis Diskriptif

Analisis Diskriptif yaitu suatu analisis yang mencoba untuk menggambarkan pola - pola yang konsisten dalam data, sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan penuh makna (Mudrajad, 2004).

Agar data yang diperoleh dapat diolah dengan menggunakan analisis kuantitatif, maka jawaban responden dalam kuesioner yang tersedia (5 pilihan) dibuat skala interval dengan nilai 5 untuk jawaban e, nilai 4 untuk jawaban d, nilai 3 untuk jawaban c, nilai 2 untuk jawaban b, dan nilai 1 untuk jawaban a.

Selanjutnya untuk memberikan deskripsi data tersebut masing – masing variabel dibuat kategori. Adapun kategori tersebut dapat diketahui dengan cara menentukan nilai skor tertinggi dan skor terendah masing – masing variabel.

Apabila disusun secara matematis dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Skor yang dicapai (s)}}{\text{Skor yang diharapkan (p x 5 x q)}} \times 100 \%$$

Dari variabel pendampingan terdiri dari 18 item dapat dikelompokkan dalam kategori : sangat efektif, cukup efektif, efektif, kurang efektif, dan tidak efektif.

Variabel pinjaman dana terdiri dari 8 item dapat dikelompokkan dalam kategori : sangat membantu, cukup membantu, membantu, kurang membantu, dan tidak membantu.

Variabel pendapatan usaha terdiri dari 4 item dapat dikelompokkan dalam kategori : sangat meningkat, cukup meningkat, meningkat, kurang meningkat, dan tidak meningkat.

Variabel simpanan usaha terdiri dari 2 item dapat dikelompokkan dalam kategori : sangat meningkat, cukup meningkat, meningkat, kurang meningkat, dan tidak meningkat.

3.8.2. Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif yaitu analisis data yang berbentuk angka (nilai). Analisis yang dipergunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini yaitu dengan analisis korelasi dan uji beda. Analisis korelasi digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif (hubungan antar variabel) dalam penelitian ini adalah korelasi product moment (r) dan uji beda. Korelasi product moment (r) yaitu teknik korelasi yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau ratio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih adalah sama.

1. Analisis korelasi *Product Moment*.

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan variabel bebas X_3 (pendapatan usaha) dengan variabel tak bebas Y (simpanan usaha), dengan rumus **koefisien korelasi (r)** sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2 \cdot \sum y^2)}}$$

Pengujian signifikansi koefisien korelasi dengan menggunakan r tabel, dengan taraf kesalahan 5%. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

2. Uji Statistik tanda Wilcoxon digunakan untuk menguji perbedaan variabel sebelum dan sesudah program dilakukan dengan menggunakan uji tanda

Wilcoxon, dengan alasan data yang diteliti berasal dari sejumlah responden yang sama dan berkaitan dengan periode waktu pengamatan yang berbeda (sebelum dan sesudah program). Dengan uji tanda Wilcoxon, dalam penelitian ini akan menguji apakah ada perbedaan nyata (ada peningkatan) pada variabel – variabel yang diamati pada waktu awal periode pengamatan dan pada akhir periode waktu pengamatan.

Adapun variabel yang diamati dan diuji adalah pendapatan usaha dan simpanan usaha. Setelah uji tanda Wilcoxon dilakukan akan muncul nilai Z dan nilai probabilita (p).

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

H_0 = Tidak ada beda variabel yang diuji antara sebelum dan sesudah program.

H_a = Ada beda variabel yang diuji antara sebelum dan sesudah program.

Jika probabilita (p) > 0,05 maka H_0 diterima, jika probabilita (p) ≤ 0,05 maka H_a diterima.

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan pada tabel berikut :

Tabel 3.8.
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi
Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber : Sugiyono,1999

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1. Diskripsi Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

A. Letak Geografis

Kelurahan Purwoyoso adalah salah satu dari 10 Kelurahan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagai suatu wilayah pemerintahan terendah dari Pemerintahan Kota Semarang. Kelurahan Purwoyoso juga sebagai salah satu kelurahan penerima bantuan P2KP yang dilaksanakan pada tahun 2000. Pemilihan Kelurahan Purwoyoso ini selain didasari pada aturan penerima bantuan P2KP yaitu dengan jumlah penduduk 7500 – 15000 juga letak geografis Kelurahan Purwoyoso yang berada di Kota Semarang, dan letaknya di pantai utara pulau Jawa. Kelurahan Purwoyoso terdiri dari 13 Rukun Warga (RW) dan 90 Rukun Tetangga (RT) dan memiliki wilayah administratif yang berbatasan dengan wilayah pemerintahan kelurahan lainnya. Luas wilayah kelurahan 135,19 Ha, sebagian besar terdiri dari daerah bukit padas dan sebagian kecil daerah dataran. Batas – batas administratifnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Krapyak
- Sebelah Selatan : Kelurahan Ngaliyan
- Sebelah Barat : Kelurahan Tambak Aji
- Sebelah Timur : Kelurahan Kembang Arum.

Kondisi geografis Kelurahan Purwoyoso berada pada ketinggian tanah dari permukaan laut yaitu 50 m, dimana wilayah ini banyak curah hujan mencapai

7.000 mm/tahun. Adapun kondisi topografinya berupa dataran rendah/tinggi dengan suhu udara rata – rata 26° C.

Dalam hubungannya dengan kegiatan pemerintahan, letak orbitasi dari Pemerintahan Kelurahan Purwoyoso cukup strategis. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan sejauh 1 Km, jarak dari Ibukota Semarang 7 Km, jarak dari Ibukota Propinsi Dati I sejauh 10 Km. Adanya kedekatan antara pusat Pemerintahan Kelurahan dengan pusat - pusat pemerintahan lainnya akan memperlancar jalannya kegiatan Pemerintahan Kelurahan.

Kelurahan Purwoyoso memiliki suatu wilayah yang dikembangkan secara khusus yakni Kawasan Industri Candi yang dibangun pada tahun 1997 dan dikelola oleh pihak swasta. Adanya Kawasan Industri Candi ini berdampak cukup berarti bagi penduduk Purwoyoso, dampak positifnya yaitu terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran khususnya penduduk sekitar kawasan industri. Sedangkan dampak negatifnya adalah bertambahnya polusi udara, polusi suara akibat aktivitas pabrik, kerusakan jalan akibat padatnya kendaraan berat yang sering melewati jalan serta bertambahnya migran yang bekerja di kawasan industri sehingga jumlah penduduk terus bertambah di Purwoyoso.

B. Keadaan Demografis

Dalam paparan keadaan demografis Kelurahan Purwoyoso akan disajikan gambaran tentang komposisi penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan mata pencaharian.

1. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.

Tabel 4.1.
Komposisi Penduduk Kelurahan Purwoyoso
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	%
	Laki – laki	Perempuan		
0 - 6	821	814	1.635	11,51
7 - 12	818	709	1.527	10,75
13 - 15	683	578	1.261	8,87
16 - 19	1.100	1.095	2.195	15,45
20 - 26	635	537	1.172	8,25
27 - 40	1.041	968	2.009	14,14
41 - 60	1.521	2.095	3.616	25,54
61 +	482	339	795	5,59
Jumlah	7.101	7.109	14.210	100,00

Sumber : Monografi Kelurahan Purwoyoso tahun 2005.

Dari tabel diatas memperlihatkan jumlah penduduk Kelurahan Purwoyoso sebanyak 14.210 jiwa yang terhimpun dalam 3.316 KK (Kepala Keluarga), dengan komposisi jenis kelamin penduduk adalah laki – laki sebanyak 7.101 jiwa dan perempuan sebanyak 7.109 jiwa. Sedangkan dari struktur umur dapat diketahui kelompok umur produktif (umur 20 tahun - 60 tahun) dan kelompok umur non produktif (umur diatas 61 tahun).

Berdasar jumlah penduduk menurut usia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu kelompok pendidikan berjumlah 6.618 jiwa, kelompok tenaga kerja berjumlah 6.797 jiwa dan kelompok usia lanjut berjumlah 795 jiwa, yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk Kelurahan Purwoyoso Tahun 2005
Menurut Kelompok Usia

KELOMPOK	KELOMPOK USIA	Jumlah (Jiwa)	%
KELOMPOK PENDIDIKAN	4 - 6 Tahun	1.485	10,56
	7 - 12 Tahun	1.527	10,86
	13 - 15 Tahun	1.261	8,97
	16 - 19 Tahun	2.195	15,61
KELOMPOK TENAGA KERJA	20 - 26 Tahun	1.172	8,34
	27 - 40 Tahun	2.009	14,29
	41 - 60 Tahun	3.616	25,72
KELOMPOK USIA LANJUT	61 Tahun ke atas	795	5,65
Jumlah		14.060	100,00

Sumber : Monografi Kelurahan Purwoyoso tahun 2005.

2. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3.
Komposisi Penduduk Kelurahan Purwoyoso
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Perguruan Tinggi	350	2,45
2.	Tamat Akademi	272	1,91
3.	Tamat SMA	5.252	36,95
4.	Tamat SMP	3.408	23,96
5.	Tamat SD	2.418	17,01
6.	Tidak Tamat SD	760	5,34
7.	Belum Tamat SD	1.329	9,34
8.	Tidak Sekolah	421	2,95
	Jumlah	14.210	100,00

Sumber : Monografi Kelurahan Purwoyoso tahun 2005 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penduduk di Kelurahan Purwoyoso dengan tingkat pendidikan tamat SMA adalah yang paling banyak yaitu mencapai 36,95 persen. Penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SMP menduduki posisi kedua yaitu mencapai 23,96 persen dan masih terdapat 5,34 persen penduduk

tidak tamat SD. Hal ini berarti masalah kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kelurahan Purwoyoso sudah cukup memadai, apalagi terdapat 4,36 persen penduduknya tamat Perguruan Tinggi.

Dari data komposisi penduduk berdasar tingkat pendidikan tersebut adalah modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kelurahan Purwoyoso. Setidak – tidaknya dengan tingkat pendidikan yang cukup, maka masyarakat akan lebih mudah untuk diarahkan dalam menerima perubahan – perubahan yang bersifat positif.

3. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Tabel 4.4.
Komposisi Penduduk Kelurahan Purwoyoso
Menurut Mata Pencapaian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)	%
1.	Petani sendiri	282	3,67
2.	Buruh tani	352	4,58
3.	Pengusaha	351	4,56
4.	Buruh Industri	327	4,25
5.	Buruh Bangunan	196	2,55
6.	Pedagang	505	6,57
7.	Pengangkutan	457	5,94
8.	Pegawai Negeri (Sipil + ABRI)	425	5,53
9.	Pensiunan	460	5,98
10.	Lain – lain	4.336	56,38
	Jumlah	7.691	100,00

Sumber : Monografi Kelurahan Purwoyoso tahun 2005 (diolah)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk di Kelurahan Purwoyoso sebagian besar mata pencahariaanya sebagai wiraswasta (pengusaha dan pedagang) 11,13 persen sedang buruh sebanyak 6,8 persen dan lainnya adalah karyawan , pensiunan, petani, buruh tani.

C. Bidang Pembangunan

Deskripsi sektor fisik/pembangunan di Kelurahan Purwoyoso dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.5.
Bidang Pembangunan di Kelurahan Purwoyoso

No.	Bidang	Bentuk	Jenis	Jumlah
1.	Agama	Sarana Peribadatan	Masjid	13 buah
			Mushola	23 buah
			Gereja	4 buah
2	Pendidikan	Pendidikan Umum	TK	7 buah
			SD	6 buah
			SMP	1 buah
		Pendidikan Khusus	Pondok Pesantren	1 buah
			Pend. Non Formal	3 buah
3	Perumahan	Perumahan	Rumah permanen	1111 buah
			Rumah semi permanen	1705 buah
			Rumah non permanen	244 buah

Sumber : Monografi Kelurahan Purwoyoso tahun 2005 (diolah)

1. Sarana Peribadatan

Dari tabel diatas terlihat bahwa di Kelurahan Purwoyoso telah tersedia sarana ibadah baik untuk penduduk yang beragama Islam berupa Masjid dan Mushola, dan Gereja merupakan sarana ibadah bagi penduduk yang beragama Kristen. Sedang untuk sarana ibadah bagi penduduk yang beragama Hindu dan Budha mereka harus ketempat – tempat lain yang ada Puri atau Wiharanya, seperti di Tanah Putih, Watu Gong dan lain sebagainya.

2. Sarana Pendidikan

Dari tabel diatas terlihat menunjukkan bahwa di Kelurahan Purwoyoso sudah tersedia tempat – tempat pendidikan baik umum (formal) yaitu dari pendidikan TK, SD, dan SMP, maupun pendidikan khusus (Pondok Pesantren) dan pendidikan non formal yang dibutuhkan oleh masyarakat Purwoyoso.

3. Sarana Perumahan

Berdasar tabel diatas memperlihatkan kondisi bahwa kondisi penduduk di Kelurahan Purwoyoso telah mampu membangun tempat tinggalnya secara layak, dan termasuk pula dilingkungan Kelurahan Purwoyoso adalah kompleks perumahan BTN. Adanya sarana dari BTN ini semakin menambah keramaian di wilayah Kelurahan Purwoyoso serta aktivitas soial ekonomi semakin berkembang.

4. Sarana Kesehatan

Di Kelurahan Purwoyoso hingga saat ini terdapat sarana kesehatan berupa unit pelayanan Puskesmas ada 1 buah. Guna membantu meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) sudah ada 3 buah Pos/Klinik KB dan dibantu oleh 13 buah Posyandu. Dengan adanya sarana kesehatan tersebut, khusus untuk pelayanan pertama dan KB maka di Kelurahan Purwoyoso tidak mengalami kendala.

5. Sarana Perekonomian

Sarana perekonomian di Kelurahan Purwoyoso ada dua bidang yang cukup menonjol yaitu :

a. Bidang Perdagangan

Perdagangan di Kelurahan Purwoyoso cukup berkembang, hal ini terlihat dari beragamnya jenis barang yang dijual. Perkembangan jenis dan jumlah pedagang di Kelurahan Purwoyoso juga dipengaruhi oleh letak geografis yang strategis, jumlah penduduk yang padat dan ramai, mudah dijangkau karena berada disisi jalan antar kota sehingga usaha perdagangan tidak mengalami kendala yang

cukup berarti. Berbagai jenis barang yang diperdagangkan antara lain barang kelontong, buah – buahan, bahan bangunan, rongsokan, mebel, kayu/kusen, BBM, makanan burung, sembilan bahan pokok, pedagang onderdil motor/mobil, alat – alat listrik , aneka usaha, warung makan dan blanja. Hasil usaha dagang ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan penduduk di Kelurahan Purwoyoso saja melainkan juga penduduk di luar Kelurahan Purwoyoso. Usaha perdagangan ini merupakan sarana perekonomian yang akan mendukung bagi pembangunan perekonomian di Kelurahan Purwoyoso sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan warganya.

b. Bidang Jasa

Bidang usaha jasa adalah bidang yang banyak digeluti oleh sebagian besar penduduk di Kelurahan Purwoyoso. Ketertarikan pada bidang jasa ini didasari pada modal yang relatif kecil dan tingkat pemasaran layanan jasanya mudah, karena jumlah penduduk yang padat sehingga merupakan pasar potensial ditambah lagi letak Kelurahan Purwoyoso yang berada di sisi jalan antar propinsi yang memungkinkan akses dan jangkauan layanan jasanya pun lebih luas. Jenis usaha jasa yang dijalani penduduk di Kelurahan Purwoyoso antara lain terdiri dari jasa transportasi seperti ojek, becak motor, angkutan umum, penjahit/konveksi, jasa telekomunikasi, jasa salon, pertukangan, jasa hiburan, jasa reparasi/bengkel, jasa persewaan mobil, jasa percetakan/sablon, jasa persewaan alat – alat pesta, dan jasa rumah kos.

6. Sarana Perhubungan

Sarana perhubungan jalan di Kelurahan Purwoyoso merupakan jalan antar kelurahan dan jalan yang menghubungkan dengan wilayah lain, dan sarana perhubungan ini telah cukup maju karena sebagian besar jalan di Kelurahan Purwoyoso telah diaspal. Selain sarana jalan juga terdapat sarana komunikasi, adanya sarana telekomunikasi ini akan mempermudah hubungan komunikasi antar warga dengan warga lain baik untuk kegiatan sosial maupun ekonomi (bisnis).

4.2. Diskripsi Pelaksanaan Program P2KP di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Pelaksanaan Program P2KP di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sesuai dengan laporan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berada pada akhir tahun keempat atau sedang memasuki tahun kelima. Kelurahan Purwoyoso menerima bantuan dana P2KP sesuai dengan ketentuan batas jumlah penduduk kelurahan yaitu antara 7.500 jiwa hingga 15.000 jiwa mendapat bantuan dana P2KP sebesar Rp. 250 juta. Berdasarkan hasil musyawarah BKM “Warga Sejahtera” selaku pengelola P2KP Kelompok sasaran penerima manfaat, serta sesuai dengan peraturan petunjuk pelaksanaan P2KP yang telah ditetapkan. Kelompok sasaran penerima manfaat P2KP adalah keluarga miskin di Kelurahan Purwoyoso, sesuai dengan rumusan kriteria kemiskinan setempat yang disepakati oleh warga, termasuk di dalamnya adalah masyarakat yang telah lama miskin, masyarakat yang penghasilannya merosot dan tidak berarti akibat inflasi, serta yang kehilangan sumber nafkahnya dikarenakan krisis ekonomi, dan lain – lainnya.

Dana dari P2KP telah berhasil dicairkan melalui KSM yang telah dibentuk yang terdiri dari 3 (tiga) tahap (dialokasikan mulai tahun 2000 – 2002) yang dipergunakan untuk KSM Fisik maupun Ekonomi dengan perincian :

Tabel 4.6. dibawah ini menunjukkan realisasi pencairan dana BLM pada tahap I dan tahap II masing – masing sebesar Rp.100.000.000,00 , untuk tahap III sebesar Rp.45.000.000,00 , sehingga total penerimaan sebesar Rp.245.000.000,00 , sisanya sebesar Rp.5.000.000,00 digunakan untuk kegiatan pendampingan, karena setelah tahun 2002 sudah tidak ada lagi kegiatan pendampingan dari KMW (Konsultan Manajemen Wilayah) maka sisa dana tersebut menjadi hangus. Kegiatan pendampingan selanjutnya diserahkan ke masing – masing kelurahan, dengan dana yang diambilkan dari bunga pinjaman.

Tabel.4.6.
Pencairan Dana P2KP di Kelurahan Purwoyoso
Tahun 2000 – 2002

Tahap	Jumlah	%
I	Rp. 100.000.000,00	40,00
II	Rp. 100.000.000,00	40,00
III	Rp. 45.000.000,00	18,00
Jumlah	Rp. 245.000.000,00	98,00

Sumber : BKM “Warga Sejahtera” 2005.

Berdasarkan petunjuk dalam buku manual P2KP dana bantuan langsung masyarakat (BLM) tersebut diperuntukkan bagi KSM yang telah terbentuk dan pengajuan proposal dengan jumlah anggota minimal 3 orang dengan komposisi 2 orang tidak mampu (sasaran P2KP) dan 1 orang mampu (KS I/KS II).

4.2.1. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang bahwa pelaksanaan P2KP diawali dengan pembentukan BKM yang dilakukan dengan pertemuan warga Kelurahan Purwoyoso yang diselenggarakan di Balai Kelurahan Purwoyoso pada tanggal 19 Februari tahun 2000 yang dihadiri oleh Lurah dan perangkatnya, Fasilitator Kelurahan, Ketua LKMD, Ketua – ketua RW, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan PKK, diberi nama BKM “Warga Sejahtera” yang beralamat di jalan Sriwidodo Utara Semarang. Tujuan pendirian BKM Kelurahan Purwoyoso untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan dipercayakan untuk mengelola bantuan program P2KP. Untuk Pengurus BKM dipilih oleh KSM - KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) untuk periode kepengurusan 2000 – 2005 dengan melalui musyawarah mufakat, yang selanjutnya disahkan secara hukum melalui kantor notaris H.Sulistio Soetomo, SH dengan nama Akta Perkumpulan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dengan mengacu pada ketentuan dan *manual project* P2KP serta disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Adapun susunan kepengurusan BKM Warga Sejahtera dapat dilihat pada. Sedang pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM Warga Sejahtera dicatat pada akte notaris 2 Agustus 2000.

Selain tugas pokok yang telah dipercayakan tersebut diatas BKM “Warga Sejahtera” juga dipercaya menangani operasional bantuan Proyek SE – Air Bersih dari pemerintah untuk Kelurahan Purwoyoso yang berada di RW VIII, RW XII dan RW I sedang pelaksanaannya adalah KSM “Tirto Argo”.

4.2.2. Gambaran Perkembangan KSM dan Dana Bergulir

Pada tahap awal P2KP di Kelurahan Purwoyoso tahun 2000, KSM yang ada di Kelurahan Purwoyoso terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu : kegiatan ekonomi sebanyak 95% dengan salah satu aktivitasnya adalah simpan pinjam dana perguliran dari P2KP dan 5% kegiatan pembangunan sarana fisik. Kegiatan ekonomi ada 9 KSM dengan jumlah anggota 48 orang dan kegiatan fisik ada 1 KSM dengan jumlah anggota 6 orang. Persentase pembiayaan kegiatan di BKM Warga Sejahtera Kelurahan Purwoyoso sebanyak 94,08% untuk kegiatan ekonomi, sedang 3,12% untuk kegiatan sosial dan 2,8% untuk kegiatan fisik.

Setelah berjalan selama 4 tahun (2000 – 2004) BKM Warga Sejahtera telah berkembang dan mandiri. Saat ini total dana yang diajukan KSM yang dinilai layak oleh BKM telah dialokasikan berjumlah Rp.900.226.500,00 (3 tahap perguliran). Perkembangan dana yang diterima BKM Warga Sejahtera Kelurahan Purwoyoso hingga tahun 2004 sebesar Rp.655.226.500,00. Perkembangan dana bergulir P2KP ini sangat bermanfaat karena jumlah keluarga miskin yang terbantu bertambah banyak sehingga akan mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Purwoyoso. Selain pertambahan jumlah dana yang semakin besar digulirkan, jumlah KSM juga semakin meningkat dari 10 KSM pada tahap awal pelaksanaan tahun 2000 dan pada tahun 2004 menjadi 96 KSM (92 KSM ekonomi dan 4 KSM fisik) dengan jumlah anggota KSM yang menerima pencairan dana sebanyak 767 KK, dari jumlah tersebut 597 KK adalah keluarga miskin (Gakin).

Kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana dasar lingkungan juga telah dilakukan oleh BKM Warga Sejahtera Kelurahan Purwoyoso. Dua kegiatan

pembangunan prasarana dasar lingkungan diantaranya adalah pembangunan sarana air bersih dengan jumlah dana Rp.12.000.000,00 yang dikelola oleh 1 KSM yaitu KSM Tirto Argo dan mampu menggalang dana swadaya dari masyarakat sebesar Rp.8.000.000,00. Pembangunan sarana air bersih ini dapat memberikan manfaat yang cukup besar bagi warga sebanyak 200 Kepala Keluarga. Pembangunan prasarana dasar lingkungan adalah terealisasinya pembangunan jalan yang menghabiskan dana sebesar Rp.31.326.500,00. Pembangunan jalan ini dikelola oleh 3 KSM dan mampu mengumpulkan dana swadaya dari masyarakat sebesar Rp.12.500.000,00. Pembangunan jalan ini dapat memberikan manfaat yang cukup besar bagi warga sebanyak 240 Kepala Keluarga. Dengan pembangunan jalan ini, akses warga ke pusat informasi dan ke pusat kota menjadi lebih terbuka, karena sebelumnya jalan sempit, berbatu dan licin apabila dilalui kendaraan bermotor. Sedangkan kegiatan ekonomi yang dibiayai dari program P2KP dalam penelitian ini (program periode I – 1) adalah KSM yang mempunyai kegiatan ekonomi produktif, adapun jenis usaha dari KSM – KSM tersebut meliputi : Warung Kelontong, Warung Makan / Catering, Bakul Blanjaan, Jamu Gendong, Loper Koran, Home Industri (Tempe, Kue Kering, Peyek, Krupuk, Telur Asin), Bengkel Elektronik, Bengkel Motor / Mobil / Las, Ojek, Becak Motor, Pengumpul besi rosok / kertas bekas, Makanan Burung, Material Bangunan, Koperasi Pasar Desa, dan Aneka Usaha.

Pinjaman modal untuk jenis usaha perdagangan diatur oleh kelompok KSM masing – masing , mulai dari Rp.500.000,00 sampai dengan Rp.1.000.000,00 untuk usaha dagang yang dikoordinir pada Pasar Desa, sedang usaha perdagangan

yang lainnya diatur oleh kelompok KSM masing – masing mulai dari Rp.1.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000,00. Pinjaman modal untuk jenis usaha jasa khususnya transportasi (becak motor) sudah dikoordinir masing – masing anggota menerima pinjaman sebesar maksimum Rp.2.000.000,00 dalam bentuk kendaraan motor bukan uang tunai. Sedang untuk jenis usaha jasa lainnya diatur oleh kelompok KSM masing – masing mulai dari Rp.1.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000,00. Pinjaman modal untuk jenis usaha industri rumah tangga diatur oleh kelompok KSM masing – masing , mulai dari Rp.1.000.000,00 sampai dengan Rp.2.500.000,00.

Untuk mengetahui lebih jelas perkembangan KSM dan dana bergulir seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.7.
Perkembangan KSM dan Dana Bergulir Program P2KP
di Kelurahan Purwoyoso (2000 – 2004)

Tahun	Jumlah KSM		Jumlah Dana Kumulatif (Rp)		Perkembangan	
	Ekonomi	Fisik	Hibah	Pinjaman	KSM	Dana
2001-2002	22	3	33.326.500	210.050.000	-	-
2002-2003	44	4	43.326.500	402.900.000	23	201.226.500
2003-2004	92	4	43.326.500	856.900.000	48	655.226.500

Sumber : BKM “Warga Sejahtera” diolah (2005)

4.3. Diskripsi Karakteristik Responden

Secara garis besar gambaran tentang responden penelitian dapat dikelompokkan menjadi sepuluh kelompok/aspek, yaitu : jenis pekerjaan, jenis usaha, jenis kelamin, jumlah tenaga yang dipekerjakan, tingkat pendidikan, umur, lama usaha, tanggungan keluarga, modal usaha dan penghasilan. Untuk mengetahui secara rinci tentang diskripsi responden dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Jenis Pekerjaan

Tabel 4.8.
Karakteristik Responden Penerima Pinjaman Dana P2KP
di Kelurahan Purwoyoso Menurut Jenis Pekerjaan

Nomor	Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
1	Pekerjaan Pokok	59	88,06
2	Pekerjaan Sambilan	8	11,94
Jumlah		67	100,00

Sumber : Data Primer diolah (2005)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) P2KP benar – benar dimanfaatkan oleh mereka yang benar – benar membutuhkan, hal ini terbukti bahwa para penerima pinjaman dana P2KP (88,06%) menyatakan sebagai pekerjaan pokok, sedang mereka yang menyatakan sebagai pekerjaan sambilan (11,94%) bekerja sebagai pegawai swasta.

2. Jenis Usaha

Jenis usaha yang dijalankan oleh responden penerima pinjaman dana P2KP secara garis besar adalah usaha perdagangan, usaha industri rumah tangga dan usaha jasa. Jenis usaha perdagangan (total 105 KK) yang paling banyak dilakukan oleh responden penerima pinjaman dana P2KP berjumlah 35 KK (52,24%), hal ini terbukti bahwa lebih 50% adalah jenis usaha tersebut. Banyaknya profesi pedagang dipengaruhi oleh berdirinya Kawasan Industri Candi di wilayah Purwoyoso sehingga mudah bagi pedagang untuk memasarkan produknya karena terdapat pasar yang potensial. Sedangkan jenis usaha jasa (total 70 KK) sebanyak 22 KK (32,84 %) dan usaha industri rumah tangga (total 30 KK) sebanyak 10 KK (14,92%). Dengan demikian tidak ada peserta program P2KP yang tidak

mempunyai bidang usaha, sehingga tepat apabila dana bergulir P2KP digunakan untuk memotivasi dan mengembangkan usaha kecil dan menengah.

Untuk melihat secara jelas karakteristik peserta program P2KP dari penggolongan jenis usaha seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9.
Karakteristik Responden Penerima Pinjaman Dana P2KP
di Kelurahan Purwoyoso Menurut Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jml	%	Jenis Usaha	Jml	%	Jenis Usaha	Jml	%
Usaha Perdagangan:			Usaha Jasa :			Usaha Industri RT:		
Kelontong	9	25,71	Transportasi	5	22,73	Rempeyek	1	10,00
Aneka Ush	1	2,86	Konveksi/Penjahit	4	18,18	Tempe	4	40,00
Sembako	4	11,43	Catering/Wr Mkn	2	9,09	Roti Kering	2	20,00
Dagang	17	48,57	Kosipa	4	18,18	Krupuk	1	10,00
Blanja	4	11,43	Bengkel	3	13,64	Telur Asin	1	10,00
			Foto Copy	1	4,54	Kerajinan	1	10,00
			Ahli Kunci	1	4,54			
			PerswnAlat Pesta	2	9,09			
Jumlah	35	100,0		22	100,0		10	100,0

Sumber : Data Primer diolah (2005)

3. Jenis Kelamin

Untuk melihat secara jelas karakteristik peserta program P2KP dari penggolongan jenis kelamin seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.10.
Karakteristik Responden Penerima Pinjaman Dana P2KP
di Kelurahan Purwoyoso Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Usaha Perdagangan		Usaha Jasa		Usaha Industri Rumah Tangga	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Laki – laki	14	40,00	17	77,27	8	80,00
Perempuan	21	60,00	5	22,73	2	20,00
Jumlah	35	100,00	22	100,00	10	100,00

Sumber : Data Primer diolah (2005)

Dari tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu 58,21% adalah laki – laki. Namun dari ketiga jenis usaha diatas, usaha perdagangan

banyak dilakukan oleh kaum perempuan (60%), hal ini menunjukkan keterlibatan perempuan lebih banyak dari pada laki – laki. Ini berarti bahwa pelaksanaan program P2KP di Kelurahan Purwoyoso melibatkan perempuan secara aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

4. Tingkat Pendidikan

Tabel.4.11.
Karakteristik Responden Penerima Pinjaman Dana P2KP
di Kelurahan Purwoyoso Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Usaha Perdagangan		Usaha Jasa		Usaha Industri Rumah Tangga	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tamat SD	18	51,43	5	22,73	6	60,00
Tamat SMP	12	34,29	11	50,00	4	40,00
Tamat SMA	3	8,57	5	22,73	0	0
Tamat P. T	2	5,71	1	4,54	0	0
Jumlah	35	100,00	22	100,00	10	100,00

Sumber : Data Primer diolah (2005)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan tertinggi yang dicapai sebagian besar anggota KSM penerima pinjaman dana P2KP di Kelurahan Purwoyoso adalah tamat SD. Rata – rata pendidikan formal masih rendah, hal ini terlihat bahwa 60% tamat SD dan 40% tamat SMP untuk jenis usaha industri rumah tangga, sedang untuk jenis usaha perdagangan 51,43% tamat SD, tamat SMP 34,29%, tamat SMA 8,57% dan yang menyelesaikan Perguruan Tinggi 5,71%, dan untuk jenis usaha jasa 22,73% tamat SD dan tamat SMA, tamat SMP 50%, dan yang menyelesaikan Perguruan Tinggi sebanyak 4,54%. Dari ketiga jenis usaha ini yang memiliki tamat SMA dengan prosentase paling tinggi yaitu jenis usaha jasa (22,73%), sedang jenis usaha industri rumah tangga tidak ada lulusan SMA maupun Perguruan Tinggi. Rendahnya pendidikan yang dicapai

karena kurangnya kesadaran responden akan pentingnya pendidikan dan keterbatasan biaya untuk pendidikan lanjutan. Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi pola pikir mereka dalam usaha, karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang mereka miliki, maka akan semakin mudah untuk menerima pembinaan yang berkaitan dengan usahanya. Walaupun tingkat pendidikan responden tidak terlalu diperhitungkan dalam program P2KP, karena sejak awal program P2KP tidak didesain untuk kualitas pendidikan keluarga miskin pada umumnya, namun yang lebih dipentingkan adalah peningkatan kesadaran peserta program bahwa tingkat pendidikan (baik formal maupun informal) bagi anak amat penting untuk perbaikan kesejahteraan keluarga. Dalam tingkat pendidikan peserta program yang heterogen dan cenderung rendah, maka kegiatan pendampingan program P2KP yang berupa penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan oleh Faskel disesuaikan dengan kemampuan dan daya tangkap peserta program. Bagi peserta program yang tingkat pendidikan lebih tinggi diberi kepercayaan menjadi ketua KSM untuk bertanggung jawab atas kepatuhan aturan program dalam hal angsuran yang tepat waktu dan tepat jumlah (tanggung renteng).

5. Umur

Tabel 4.12.
Karakteristik Responden Penerima Pinjaman Dana P2KP di
Kelurahan Purwoyoso Menurut Umur

Umur	Usaha Perdagangan		Usaha Jasa		Usaha Industri Rumah Tangga	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Antara 20 th – 29 th	0	0	1	4,55	0	0
Antara 30 th – 39 th	3	8,57	4	18,18	1	10,00
Antara 40 th – 49 th	19	54,29	6	27,27	6	60,00
Antara 50 th – 59 th	12	34,29	10	45,45	2	20,00
60 tahun +	1	2,85	1	4,55	1	10,00
Jumlah	35	100,00	22	100,00	10	100,00

Sumber : Data Primer diolah (2005)

Umur responden peserta program P2KP cukup bervariasi bervariasi antara 20 – 60 tahun keatas. Kelompok umur 40 – 49 tahun merupakan kelompok umur dengan prosentase tertinggi yaitu untuk jenis usaha perdagangan 54,29%, usaha industri rumah tangga 60%, sedang untuk jenis usaha jasa usia tertinggi yaitu 50 – 59 tahun ada 45,45%. Kelompok umur ini merupakan kelompok umur produktif, dimana seseorang pada usia tersebut mempunyai potensi yang cukup kuat dari segi fisik dan kematangan berpikir maupun bertindak yang cukup baik. Dengan demikian pemilihan peserta program P2KP telah sesuai dengan *Standard Operation Procedure (SOP)* P2KP.

6. Tenaga Kerja Yang Dipekerjakan

Tabel 4.13.
Karakteristik Responden Penerima Pinjaman Dana P2KP
di Kelurahan Purwoyoso Menurut Tenaga Kerja Yang Dipekerjakan

Tenaga Kerja Yang Dipekerjakan	Usaha Perdagangan		Usaha Jasa		Usaha Industri Rumah Tangga	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1 orang	23	65,71	10	45,45	1	10
2 – 3 orang	10	28,57	11	50,00	9	90
4 – 5 orang	2	5,72	1	4,55	0	0
Jumlah	35	100,00	22	100,00	10	100,00

Sumber : Data Primer diolah (2005)

Jika melihat tabel di atas, maka jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa 94,28% untuk jenis usaha perdagangan, 95,45% untuk jenis usaha jasa dan 100 persen untuk jenis usaha industri rumah tangga mereka hanya mempekerjakan satu sampai tiga orang. Hal inipun dapat dimengerti bahwa dari usaha yang meeka lakukan itu umumnya hanya mempekerjakan anak/istri/suami/saudara sendiri. Karena dengan modal yang

relatif kecil itu maka mereka belum mampu untuk membayar tenaga di luar keluarga.

7. Lama Usaha

Tabel 4.14.
Karakteristik Responden Penerima Pinjaman Dana P2KP di Kelurahan Purwoyoso Menurut Lama Usaha

Lama Usaha	Usaha Perdagangan		Usaha Jasa		Usaha Industri Rumah Tangga	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Kurang dari 3 tahun	0	0	0	0	0	0
Antara 4 – 5 tahun	15	42,86	7	31,82	4	40,00
Antara 6 – 7 tahun	15	42,86	11	50,00	6	60,00
Lebih dari 7 tahun	5	14,28	4	18,18	0	0
Jumlah	35	100,00	22	100,00	10	100,00

Sumber : Data Primer diolah (2005)

Lama usaha responden jika dilihat dari tabel di atas ada kecenderungan bahwa usaha tersebut dilakukan sudah cukup lama sebelum program P2KP itu ada. Namun ada juga dari mereka usahanya baru dimulai bersamaan dengan program.

8. Tanggungan Keluarga

Tabel 4.15.
Karakteristik Responden Penerima Pinjaman Dana P2KP Di Kelurahan Purwoyoso Menurut Tanggungan Keluarga

Tanggungan Keluarga	Usaha Perdagangan		Usaha Jasa		Usaha Industri Rumah Tangga	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1 – 3 orang	27	77,14	19	86,36	8	80,00
4 – 6 orang	8	22,86	3	13,64	2	20,00
Jumlah	35	100,00	22	100,00	10	100,00

Sumber : Data Primer diolah (2005)

Peserta program P2KP kebanyakan mempunyai tanggungan yang masih menjadi beban ekonomi keluarga antara 3 sampai dengan 6 orang. Pada tabel

diatas jika dilihat dari jumlah tanggungan keluarga yang dibiayai umumnya relatif kecil yaitu 1 – 3 orang sebanyak 77,14% untuk jenis usaha perdagangan, 86,36% untuk usaha jasa dan 80% untuk jenis usaha industri rumah tangga. Sedangkan sisanya mereka mempunyai tanggungan keluarga antara 4 – 6 orang. Jumlah tanggungan keluarga ini menyebabkan beban pada keluarga dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari – hari juga ikut meningkat seiring dengan semakin besarnya Jumlah tanggungan yang harus ditanggung keluarga. Sehingga tepat apabila dana bergulir P2KP diterima bagi keluarga yang mempunyai beban tanggungan keluarga yang cukup besar.

9. Modal Usaha

Ditinjau dari modal usaha yang dimiliki oleh responden peserta program P2KP sebelum menjadi peserta program P2KP antara Rp.300.000,00 sampai Rp.900.000,00 yaitu sebanyak 25 keluarga (37,31%). Sedang sebanyak 5 keluarga (7,46 persen) yang memiliki modal usaha lebih dari Rp.4.000.000,00 dan sebanyak 23 keluarga (34,33%) memiliki modal usaha antara Rp.1.000.000,00 sampai Rp.2.000.000,00. Sisanya sebanyak 14 keluarga (20,90%) memiliki modal usaha antara Rp.2.001.000,00 sampai Rp.4.000.000,00. Hal ini merupakan indikasi bahwa modal usaha yang dimiliki peserta program P2KP sebelum terlibat dalam P2KP termasuk dalam kategori modal usaha kecil.

Setelah berjalan dua tahun menjadi peserta program P2KP telah menerima pinjaman dana bergulir dari P2KP yang diangsur setiap bulan dengan bunga 1,5 persen per bulan dari pokok pinjaman, telah mengalami perubahan yaitu penurunan jumlah peserta program P2KP yang memiliki modal usaha kurang dari

Rp. 1.000.000,00 semula ada 25 keluarga menjadi tidak ada, karena modal usaha mereka telah meningkat. Sedang yang memiliki modal usaha antara Rp.1.000.000,00 sampai Rp.2.000.000,00 semula ada 23 keluarga menjadi sebanyak 31 keluarga (46,27%) dan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp.4.000.000,00 yang semula ada 5 keluarga menjadi sebanyak 9 keluarga (13,43%) berarti ada peningkatan modal usaha. Dari Hasil penelitian dikatakan bahwa program P2KP telah mencapai salah satu tujuannya di bidang ekonomi, yakni pemberian pinjaman tambahan modal usaha bagi masyarakat ekonomi lemah yang mau berusaha. Hal ini didukung dari penilaian peserta program P2KP yang menyatakan 85,08 % cukup terbantu dengan pinjaman modal program P2KP untuk tambahan modal usaha. Keadaan ini membuktikan bahwa program P2KP di Kelurahan Purwoyoso mencapai sasaran yang ditetapkan dalam membantu peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat miskin di kota.

Perkembangan modal usaha yang dimiliki peserta program P2KP menurut jenis usaha dapat dilihat pada tabel 4.16.

10. Tingkat Pendapatan (Penghasilan Keluarga)

Sebagian pendapatan (penghasilan keluarga) responden peserta program P2KP sebelum tahun 2000 sebelum menjadi peserta program P2KP yaitu kurang dari Rp.301.000,00 sebanyak 36 responden (53,73%), yang mempunyai pendapatan antara Rp.301.000,00 – Rp.500.000,00 ada sebanyak 15 responden (22,39%), yang mempunyai penghasilan antara Rp.501.000,00 – Rp.800.000,00 ada sebanyak 10 keluarga (14,93%) sedangkan yang mempunyai penghasilan diatas Rp.800.000,00 sebanyak 6 keluarga (8,96%). Namun setelah menjadi

peserta program P2KP dan memperoleh pinjaman modal P2KP yang dimanfaatkan untuk peningkatan usahanya maka yang masih mempunyai penghasilan kurang dari Rp.301.000,00 berkurang tinggal 7 keluarga (10,45%) , sedang yang mempunyai penghasilan antara Rp. 301.000,00 – Rp.500.000,00 meningkat menjadi 16 keluarga (23,88%), yang mempunyai penghasilan antara Rp. 501.000,00 – Rp. 800.000,00 meningkat menjadi 16 keluarga (23,88%) dan yang mempunyai penghasilan diatas Rp. 800.000,00 ada 28 keluarga (41,79%).

Pendapatan keluarga yang dimiliki oleh peserta program P2KP sebelum dan sesudah program berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada tabel 4.17.

11. Tabungan (Simpanan)

Sebagian besar responden peserta program P2KP sebelum tahun 2000 yaitu sebelum responden menjadi peserta program P2KP tidak mempunyai tabungan karena tidak ada uang yang digunakan untuk menabung, semua pendapatan telah habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari. Setelah menjadi peserta program P2KP mereka mulai memiliki tabungan (tabel. 4.18) walaupun yang mereka sisihkan itu tidak terlalu besar karena sebagian besar peserta program P2KP dalam menjalankan usahanya dengan skala sangat kecil sehingga hasil usaha yang dilakukan oleh peserta program hanya terkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap peserta program P2KP diwajibkan untuk menabung dengan tujuan memberikan pembelajaran kepada peserta program agar tidak membiasakan menghabiskan pendapatan hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari, namun digunakan juga untuk kebutuhan dimasa mendatang.

Tabel 4.16.
Modal Usaha Yang Dimiliki Responden Peserta Program P2KP
Di Kelurahan Purwoyoso

Modal Usaha	Usaha Perdagangan				Usaha Jasa				Usaha Industri Rumah Tangga			
	Sebelum Program		Sesudah Program		Sebelum Program		Sesudah Program		Sebelum Program		Sesudah Program	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Rp.300 rb – Rp.900rb	11	37,14	0	0	6	27,28	0	0	8	80,00	0	0
Rp.1 juta – Rp.2 juta	13	31,43	15	42,86	8	36,36	10	45,45	2	20,00	6	60,00
Rp2,001juta – Rp.3 juta	4	11,43	8	22,86	4	18,18	5	22,73	0	0	4	40,00
Rp.3,001juta – Rp4 juta	2	5,71	4	11,42	4	18,18	6	27,27	0	0	0	0
Rp4,001juta– Rp.10juta	5	14,29	8	22,86	0	0	1	4,55	0	0	0	0
Jumlah	35	100,00	35	100,00	22	100,00	22	100,00	10	100,00	10	100,00

Sumber : Data primer diolah

Tabel 4.17.
Penghasilan Keluarga Responden Peserta Program P2KP
di Kelurahan Purwoyoso per Bulan

Penghasilan Keluarga Per Bulan	Usaha Perdagangan				Usaha Jasa				Usaha Industri Rumah Tangga			
	Sebelum Program		Sesudah Program		Sebelum Program		Sesudah Program		Sebelum Program		Sesudah Program	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Rp 100 rb – Rp.300 rb	17	48,57	0	0	12	54,55	7	31,82	7	70,00	0	0
Rp301 rb – Rp500 rb	8	22,86	3	8,57	4	18,18	12	54,55	3	30,00	1	10,00
Rp.501 rb –Rp.800 rb	5	14,29	7	20,00	5	22,73	2	9,09	0	0	7	70,00
Rp.801 rb – Rp1,5 juta	5	14,29	25	71,43	1	4,54	1	4,54	0	0	2	20,00
Jumlah	35	100,00	35	100,00	22	100,00	22	100,00	10	100,00	10	100,00

Sumber : Data primer diolah

Tabel .4.18.
Tabungan Keluarga Responden Peserta Program P2KP
di Kelurahan Purwoyoso per Bulan

Tabungan Keluarga Per bulan	Usaha Perdagangan				Usaha Jasa				Usaha Industri Rumah Tangga			
	Sebelum Program		Sesudah Program		Sebelum Program		Sesudah Program		Sebelum Program		Sesudah Program	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Rp20 ribu – Rp. 30 ribu	25	71,43	0	28,57	16	72,73	2	9,09	10	100,00	1	10,00
Rp31 ribu – Rp.40 ribu	5	14,29	10	71,43	5	22,73	12	54,55	0	0	7	70,00
Rp.41 ribu – Rp.50 ribu	0	0	0	0	1	4,54	8	36,36	0	0	2	20,00
Rp.51 ribu – Rp 75 ribu	3	8,57	23	65,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Rp.76 ribu - Rp100 ribu	2	5,71	2	5,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	35	100,00	35	100,00	22	100,00	22	100,00	10	100,00	10	100,00

Sumber : Data primer diolah

12. Aset Produktif

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa sebagian besar peserta program P2KP mampu menambah aset produktifnya setelah menjadi peserta program P2KP, hal ini terlihat bahwa program P2KP membawa dampak positif karena dapat menambah aset produktif yang dimilikinya. Jenis pertambahan aset produktif yang dimiliki setelah terlibat dalam P2KP kebanyakan adalah perabotan rumah tangga seperti kompor, mesin jahit/obras, kulkas, panci dan lainnya yang ada hubungannya dengan kegiatan usahanya. Dipilihnya perabotan rumah tangga ini karena dapat dinikmati secara langsung dan terasa manfaatnya, dari pada aset dalam bentuk tanah atau bangunan yang selain mahal untuk membelinya juga mahal dalam perawatannya. Hal ini berarti bahwa P2KP telah berhasil meningkatkan kesejahteraan hidup peserta program, dan dana bergulir bermanfaat.

Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan aset produktif yang dimiliki oleh peserta program P2KP menurut jenis usaha :

Tabel 4.19.

Penambahan Aset Produktif Peserta Program P2KP Sesudah Program

Penambahan Aset Produktif	Usaha Perdagangan		Usaha Jasa		Usaha Industri Rumah Tangga	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Kendaraan roda 2	4	11,43	16	72,73	1	10,00
Ternak	9	25,71	0	0	1	10,00
Bangunan	2	5,71	0	0	0	0
Perabot Rumah Tangga	20	57,15	6	27,27	8	80,00
Jumlah	35	100,00	22	100,00	10	100,00

Sumber : Data Primer diolah

4.4. Perkembangan Tahapan Keluarga Sejahtera

Tahapan Keluarga Sejahtera di Kelurahan Purwoyoso walaupun belum menunjukkan perubahan secara drastis, seperti pada tabel berikut :

Tabel. 4.21.
Tahapan Keluarga Sejahtera di Kelurahan Purwoyoso

Nomor	Tahapan	Awal	Sekarang	- / +
1	Pra KS	167	107	- 60
2	KS I	48	59	+ 11
3	KS II + III	59	72	+ 13
Jumlah		274	238	

Sumber : PLKB Kelurahan Purwoyoso diolah

Dari tabel diatas menunjukkan gambaran perkembangan yang positif, hal ini terlihat dari tahapan keluarga Pra Sejahtera penerima program P2KP telah turun dari 167 Kepala Keluarga menjadi 107 Kepala Keluarga berarti telah berkurang 60 Kepala Keluarga. Disamping penurunan tahapan keluarga Pra Sejahtera juga diikuti dengan kenaikan jumlah Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II dan Keluarga Sejahtera III. Hal ini berarti telah sesuai dengan indikator keberhasilan pemanfaatan dana pinjaman program P2KP yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta program.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian tentang implementasi pelaksanaan Program P2KP di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Berdasarkan tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja Faskel pendampingan program P2KP maka dilakukan pembahasan secara diskriptif, sedang untuk menganalisis hubungan antara pendampingan dan pinjaman modal dengan pendapatan usaha dan simpanan usaha menggunakan teknik analisis korelasi product moment. Untuk menganalisis perbedaan pendapatan usaha dan simpanan usaha sebelum dan sesudah program P2KP menggunakan uji beda dengan analisis Uji Tanda Wilcoxon dengan bantuan paket program SPSS.

5.1. Diskripsi Kinerja Fasilitator Kelurahan

Diskripsi untuk mengetahui kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel) dalam pelaksanaan program P2KP di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang berdasarkan penelitian terhadap 67 responden yang menjawab atas pertanyaan variabel pendampingan meliputi aktivitas, kemampuan, tanggung jawab dan penyampaian materi pendampingan.

5.1.1. Aktivitas Faskel Dalam Pendampingan

Aktivitas Faskel dalam pelaksanaan program P2KP di Kelurahan Purwoyoso dapat dilihat dari keaktifan dalam kegiatan pendampingan.

Tabel 5.1.
Keaktifan Faskel Dalam Pendampingan

Nomor	Keaktifan	Jumlah	Prosentase
1	Tidak aktif	-	-
2	Kurang aktif	2	2,99
3	Cukup aktif	48	71,64
4	Aktif	12	17,91
5	Sangat aktif	5	7,46
Jumlah		67	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Dari tabel diatas menunjukkan 71,64% responden menyatakan bahwa aktivitas Faskel dalam pelaksanaan kegiatan program P2KP di Kelurahan Purwoyoso ternyata cukup aktif, walau 2,99% menyatakan kurang aktif. Adanya keaktifan Faskel baik dalam membimbing dan memotivasi peserta program serta memfasilitasi permasalahan yang dihadapi peserta program, memungkinkan segala kegiatan program P2KP akan dapat dijalankan dengan baik. Keaktifan ini terlihat dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan mereka selalu hadir dan memperhatikan persoalan – persoalan yang dihadapi peserta program.

5.1.2. Kemampuan Faskel Dalam Pendampingan

Tabel 5.2.
Kemampuan Faskel Dalam Pendampingan

Nomor	Kemampuan	Jumlah	Prosentase
1	Tidak mampu	-	-
2	Kurang mampu	1	1,49
3	Cukup mampu	19	28,36
4	Mampu	30	44,78
5	Sangat mampu	17	25,37
Jumlah		67	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Berdasarkan tabel 5.2. dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 44,78% menyatakan bahwa Faskel mampu dalam memfasilitasi program,

komunikasi dan membantu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi peserta program, walau 1,49% menyatakan kurang mampu. Kemampuan yang baik yang dimiliki oleh Faskel dapat membantu setiap kegiatan peserta program sehingga akan memperlancar keberhasilan pelaksanaan program P2KP.

5.1.3. Tanggung Jawab Faskel Dalam Pendampingan

Tabel 5.3.
Tanggung Jawab Faskel Dalam Pendampingan

Nomor	Tanggung Jawab	Jumlah	Prosentase
1	Tidak memiliki	-	-
2	Kurang memiliki	-	-
3	Cukup memiliki	29	43,28
4	Memiliki	27	40,30
5	Sangat memiliki	11	16,42
Jumlah		67	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 43,28% menyatakan bahwa Faskel cukup memiliki tanggung jawab, 40,30% menyatakan memiliki tanggung jawab dan 16,42% menyatakan sangat memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program P2KP. Tanggung jawab ini terlihat pada semangat pengabdian, kerelaan dan loyalitas terhadap perannya dalam kegiatan pendampingan. Adanya semangat pengabdian, kerelaan dalam membantu serta loyalitas yang tinggi dari Faskel memungkinkan program akan berjalan baik dan berkesinambungan.

5.1.4. Materi Pendampingan

Tabel 5.4.
Materi Kegiatan Pendampingan

Nomor	Keaktifan Faskel	Jumlah	Prosentase
1	Tidak lengkap	-	-
2	Kurang lengkap	-	-
3	Ragu – ragu	47	70,15
4	Lengkap	19	28,36
5	Sangat lengkap	1	1,49
Jumlah		67	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 70,15% menyatakan ragu – ragu tentang kelengkapan materi kegiatan pendampingan, sedikit yang menyatakan materi lengkap. Ini berarti masih ada materi – materi kegiatan yang sebenarnya dirasa merupakan kebutuhan peserta program P2KP namun ternyata tidak ada dalam materi kegiatan yang disiapkan oleh P2KP, dan juga dirasa kurang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam kegiatan menyampaikan materi program P2KP dan pelatihan bagi anggota KSM peserta program P2KP di Kelurahan Purwoyoso ternyata Faskel cukup mampu menjelaskan secara rinci dan jelas serta mampu menjawab setiap pertanyaan responden.

5.1.5. Penilaian kinerja Faskel

Penilaian kinerja Faskel dalam melaksanakan tugas pendampingan program P2KP di tingkat kelurahan dinilai dalam empat *item* yaitu tingkat aktifitas Faskel dalam pendampingan, tingkat kemampuan Faskel dalam pendampingan, tanggung jawab Faskel dalam pendampingan dan materi kegiatan pendampingan, menurut penilaian sudah terlaksana cukup baik karena prosentasenya lebih dari 40%,

sehingga dapat dikatakan bahwa sub indikator pendampingan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Untuk mengetahui tingkat kinerja Faskel dalam melaksanakan kegiatan pendampingan program P2KP di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dihitung dengan analisa rata – rata prosentase indikator kinerja Faskel, dengan rumus :

$$\frac{\text{Skor yang dicapai (s)}}{\text{Skor yang diharapkan (p x 5 x q)}} \times 100 \%$$

Dimana : p = Jumlah responden

5 = nilai skor tertinggi

q = jumlah item

Jika diketahui : p = 67 ; nilai skor tertinggi = 5 ; q = 18 dan s = 4138, maka hitungan tingkat kinerja Faskel adalah :

$$= \frac{4138}{67 \times 5 \times 18} \times 100 \% = 68,62 \%$$

Untuk mengetahui hasil nilai rata – rata prosentase indikator kinerja Faskel sebesar 68,62% dikatakan tinggi dan rendah, digunakan klasifikasi prosentase dan kategorinya sebagai berikut :

0,00% s/d 24,99% = Rendah ; 50,00% s/d 74,99% = Tinggi

0,256% s/d 49,99% = Sedang ; 75,00% s/d 100,00% = Sangat Tinggi

Berdasarkan klasifikasi prosentase dan kategorinya, maka terlihat bahwa hasil nilai rata – rata prosentase indikator kinerja Faskel sebesar 68,62% berada dalam interval 50,00% s/d 74,99% dalam kategori tinggi. Jadi dapat dikatakan

bahwa kinerja Faskel dalam melaksanakan kegiatan pendampingan program P2KP di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang adalah tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Faskel dalam melaksanakan kegiatan pendampingan program P2KP di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang adalah efektif, yang berarti kegiatan pendampingan yang telah dilakukan oleh Faskel dapat meningkatkan usaha peserta program P2KP. Dengan meningkatnya usaha maka pendapatan usaha peserta program P2KP juga akan meningkatkan, meningkatnya pendapatan usaha peserta program P2KP juga akan meningkatkan tabungan usaha guna peningkatan usaha di masa mendatang. Hal ini akan memudahkan bagi peserta program P2KP untuk dapat menjalankan usahanya di masa mendatang mendatang secara mandiri.

5.2. Analisis Korelasi

5.2.1. Pengujian Hipotesis X_1 (Pendampingan) dengan X_3 (Pendapatan Usaha)

Untuk menguji kuat tidaknya hubungan antara variabel X_1 (pendampingan) dengan variabel X_3 (pendapatan usaha), maka untuk menghitung **koefisien korelasinya** (r_1) dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{x_1x_3} = \frac{\sum x_1x_3}{\sqrt{(x_1^2x_3^2)}}$$

Jenis Usaha	$X_1 X_3$	X_1^2	X_3^2	$r_{x_1x_3}$	r tabel	r^2
Perdagangan	28378	146836	5620	0,9879	0,334	0,9759
Jasa	13457	88549	2297	0,9435	0,423	0,8902
Industri Rumah Tangga	4316	35901	526	0,9932	0,632	0,9864

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi (r) sebesar 0,9879 untuk usaha perdagangan, untuk usaha jasa sebesar 0,9435 dan sebesar 0,9932 untuk usaha industri rumah tangga, ini menunjukkan ada korelasi positif antara pendampingan dengan pendapatan usaha dari ketiga jenis usaha. Hal ini berarti semakin efektif pendampingan maka akan semakin besar pendapatan usaha.

Nilai r tabel pada taraf kepercayaan 95% sebesar 0,334 untuk usaha perdagangan, untuk usaha jasa sebesar 0,423 dan sebesar 0,632 untuk usaha industri rumah tangga, ternyata nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel sehingga hipotesis nihil (H_0) yang menyatakan “tidak ada hubungan antara pendampingan dengan pendapatan usaha” **ditolak**. Sedangkan hipotesis kerja (H_a) yang berbunyi “ada hubungan antara pendampingan dengan pendapatan usaha” **diterima**, atau pendampingan benar – benar ada hubungan kuat dengan pendapatan usaha. Jadi kesimpulannya ada hubungan positif dan kuat antara pendampingan dengan pendapatan usaha. Data dan koefisien yang diperoleh dalam sampel tersebut dapat digeneralisasikan pada populasi dimana sampel diambil atau data tersebut mencerminkan keadaan populasi.

Sedang angka koefisien determinasinya (r^2) = 0,9759 untuk usaha perdagangan, untuk usaha jasa sebesar 0,8902 dan sebesar 0,9864 untuk usaha industri rumah tangga, hal ini berarti varian yang terjadi pada variabel pendampingan sebesar 98,64% dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel pendapatan usaha untuk usaha industri rumah tangga, atau pendapatan usaha sebesar 98,64% ditentukan oleh pendampingan dan 1,36% ditentukan oleh faktor lain.

5.2.2. Pengujian Hipotesis X_2 (Pinjaman Modal) dengan X_3 (Pendapatan Usaha)

Untuk menguji kuat tidaknya hubungan antara variabel X_2 (Pinjaman Modal) dengan variabel (pendapatan usaha) X_3 , maka untuk menghitung koefisien korelasinya (r_2) dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{x_2x_3} = \frac{\sum X_2 X_3}{\sqrt{X_2^2 X_3^2}}$$

Jenis Usaha	$X_2 X_3$	X_2^2	X_3^2	$r_{x_2x_3}$	r tabel	r^2
Perdagangan	11974	26541	5620	0,9804	0,334	0,9612
Jasa	5633	15322	2297	0,9495	0,423	0,9016
Industri Rumah Tangga	1715	5725	526	0,9883	0,632	0,9767

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi (r) sebesar 0,9804 untuk usaha perdagangan, untuk usaha jasa sebesar 0,9495 dan sebesar 0,9883 untuk usaha industri rumah tangga, ini menunjukkan ada korelasi positif antara pinjaman modal dengan pendapatan usaha dari ketiga jenis usaha. Hal ini berarti semakin besar pinjaman modal yang diterima dan dimanfaatkan maka akan semakin besar pula pendapatan usaha.

Nilai r tabel pada taraf kepercayaan 95% sebesar 0,334 untuk usaha perdagangan, untuk usaha jasa sebesar 0,423 dan sebesar 0,632 untuk usaha industri rumah tangga, ternyata nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel sehingga hipotesis nihil (H_0) yang menyatakan “tidak ada hubungan antara pinjaman modal dengan pendapatan usaha” **ditolak**. Sedangkan hipotesis kerja (H_a) yang berbunyi “ada hubungan antara pinjaman modal dengan pendapatan usaha” **diterima**. Atau pinjaman modal benar – benar ada hubungan kuat dengan

pendapatan usaha. Jadi kesimpulannya ada hubungan positif dan kuat antara pinjaman modal dengan pendapatan usaha. Data dan koefisien yang diperoleh dalam sampel tersebut dapat digeneralisasikan pada populasi dimana sampel diambil atau data tersebut mencerminkan keadaan populasi.

Sedang angka koefisien determinasinya (r^2) = 0,9612 untuk usaha perdagangan, untuk usaha jasa sebesar 0,9016 dan sebesar 0,9767 untuk usaha industri rumah tangga, hal ini berarti varian yang terjadi pada variabel pinjaman modal sebesar 96,12% dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel pendapatan usaha untuk usahaperdagangan, atau pendapatan usaha sebesar 96,12% ditentukan oleh pinjaman modal dan 3,88% ditentukan oleh faktor lain.

5.2.3. Pengujian Hipotesis X_3 (Pendapatan Usaha) dengan Y (Simpanan Usaha)

Untuk menguji kuat tidaknya hubungan antara variabel bebas X_3 (pendapatan usaha) dengan variabel tak bebas Y (simpanan usaha), maka untuk menghitung koefisien korelasinya dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{x_3y} = \frac{\sum x_3y}{\sqrt{(x_3^2 y^2)}}$$

Jenis Usaha	X_3Y	X_3^2	Y^2	r_{x_3y}	r tabel	r^2
Perdagangan	1579	5620	574	0,8791	0,334	0,7728
Jasa	714	2297	230	0,9823	0,423	0,9649
Industri Rumah Tangga	216	526	90	0,9927	0,632	0,9855

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi (r) sebesar 0,8791 untuk usaha perdagangan, untuk usaha jasa sebesar 0,9823 dan sebesar 0,9927 untuk usaha industri rumah tangga, ini menunjukkan ada korelasi positif antara pendapatan

usaha dengan simpanan usaha. Hal ini berarti semakin besar pendapatan usaha maka akan semakin besar pula simpanan usaha.

Nilai r tabel pada taraf kepercayaan 95% sebesar 0,334 untuk usaha perdagangan, sebesar 0,423 untuk usaha jasa dan sebesar 0,632 untuk usaha industri rumah tangga, ternyata nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, sehingga hipotesis nihil (H_0) yang menyatakan “tidak ada hubungan antara pendapatan usaha dengan simpanan usaha” **ditolak**. Sedangkan hipotesis kerja (H_a) yang berbunyi “ada hubungan antara pendapatan usaha dengan simpanan usaha” **diterima**. Atau pendapatan usaha benar – benar ada hubungan kuat dengan simpanan usaha. Jadi kesimpulannya ada hubungan positif dan kuat antara simpanan usaha dengan pendapatan usaha. Data dan koefisien yang diperoleh dalam sampel tersebut dapat digeneralisasikan pada populasi dimana sampel diambil atau data tersebut mencerminkan keadaan populasi.

Sedang angka koefisien determinasinya (r^2) = 0,9649, hal ini berarti varian yang terjadi pada variabel simpanan usaha sebesar 96,49% dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel pendapatan usaha untuk usaha jasa, atau simpanan usaha sebesar 96,49% ditentukan oleh pendapatan usaha dan 3,51% ditentukan oleh faktor lain.

5.2.4. Pengujian Hipotesis X_1 (Pendampingan) dengan Y (simpanan Usaha)

Untuk menguji kuat tidaknya hubungan antara variabel bebas X_1 (pendampingan) dengan variabel tak bebas Y (simpanan usaha), maka untuk menghitung **koefisien korelasinya** dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{xly} = \frac{\sum x_1 y}{\sqrt{x_1^2 y^2}}$$

Jenis Usaha	X ₁ Y	X ₁ ²	Y	r _{xly}	r tabel	r ²
Perdagangan	8067	146836	474	0,9670	0,334	0,9351
Jasa	4389	88549	230	0,9725	0,423	0,9458
Industri Rumah Tangga	1797	35901	90	0,9997	0,632	0,9994

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi (r) sebesar 0,9670 untuk usaha perdagangan, untuk usaha jasa sebesar 0,9725 dan sebesar 0,9997 untuk usaha industri rumah tangga, ini menunjukkan ada korelasi positif antara pendampingan dengan simpanan usaha dari ketiga jenis usaha. Hal ini berarti semakin efektif pendampingan maka akan semakin besar simpanan usaha.

Nilai r tabel pada taraf kepercayaan 95% sebesar 0,334 untuk usaha perdagangan, untuk usaha jasa sebesar 0,423 dan sebesar 0,632 untuk usaha industri rumah tangga, ternyata nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel sehingga hipotesis nihil (H₀) yang menyatakan “tidak ada hubungan antara pendampingan dengan simpanan usaha” **ditolak**. Sedangkan hipotesis kerja (H_a) yang berbunyi “ada hubungan antara pendampingan dengan simpanan usaha” **diterima**. Atau pendampingan benar – benar ada hubungan kuat dengan simpanan usaha. Jadi kesimpulannya ada hubungan positif dan kuat antara pendampingan dengan simpanan usaha. Data dan koefisien yang diperoleh dalam sampel tersebut dapat digeneralisasikan pada populasi dimana sampel diambil atau data tersebut mencerminkan keadaan populasi.

Sedang angka koefisien determinasinya (r²) = 0,9351 untuk usaha perdagangan, untuk usaha jasa sebesar 0,9458 dan sebesar 0,9994 untuk usaha

industri rumah tangga, hal ini berarti varian yang terjadi pada variabel pendampingan sebesar 99,94% dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel simpanan usaha untuk usaha industri rumah tangga, atau simpanan usaha sebesar 99,94% ditentukan oleh pendampingan dan 0,06% ditentukan oleh faktor lain.

5.2.5. Pengujian Hipotesis X_2 (Pinjaman Modal) dengan Y (Simpanan Usaha)

Untuk menguji kuat tidaknya hubungan antara variabel bebas X_2 (pinjaman modal) dengan variabel tak bebas Y (simpanan usaha), maka untuk menghitung koefisien korelasinya dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{x_2y} = \frac{\sum x_2y}{\sqrt{\sum x_2^2 \sum y^2}}$$

Jenis Usaha	X_2 Y	X_2^2	Y^2	r_{x_2y}	r tabel	r^2
Perdagangan	3367	26541	474	0,9493	0,334	0,9012
Jasa	1833	15322	230	0,9764	0,423	0,9534
Industri Rumah Tangga	717	5725	90	0,9989	0,632	0,9978

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi (r) sebesar 0,9493 untuk usaha perdagangan, untuk usaha jasa sebesar 0,9764 dan sebesar 0,9989 untuk usaha industri rumah tangga, ini menunjukkan ada korelasi positif antara pinjaman modal dengan simpanan usaha dari ketiga jenis usaha. Hal ini berarti semakin besar pinjaman modal maka akan semakin besar simpanan usaha.

Nilai r tabel pada taraf kepercayaan 95% sebesar 0,334 untuk usaha perdagangan, untuk usaha jasa sebesar 0,423 dan sebesar 0,632 untuk usaha industri rumah tangga, ternyata nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel sehingga hipotesis nihil (H_0) yang menyatakan “tidak ada hubungan antara

pinjaman modal dengan simpanan usaha” **ditolak**. Sedangkan hipotesis kerja (H_a) yang berbunyi “ada hubungan antara pinjaman modal dengan simpanan usaha” **diterima**. Atau pinjaman modal benar – benar ada hubungan kuat dengan simpanan usaha. Jadi kesimpulannya ada hubungan positif dan kuat antara pinjaman modal dengan simpanan usaha. Data dan koefisien yang diperoleh dalam sampel tersebut dapat digeneralisasikan pada populasi dimana sampel diambil atau data tersebut mencerminkan keadaan populasi.

Sedang angka koefisien determinasinya (r^2) = 0,9012 untuk usaha perdagangan, untuk usaha jasa sebesar 0,9534 dan sebesar 0,9978 untuk usaha industri rumah tangga, hal ini berarti varian yang terjadi pada variabel pinjaman modal sebesar 99,78% dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel simpanan usaha untuk usaha industri rumah tangga, atau simpanan usaha sebesar 99,78% ditentukan oleh pinjaman modal dan 0,22% ditentukan oleh faktor lain.

5.3. Uji Tanda Wilcoxon

Penggunaan model Uji Pangkat Tanda Wilcoxon dikarenakan dalam penelitian ini mencoba melakukan uji beda tingkat kesejahteraan Gakin peserta program P2KP (dari sisi usaha) sebelum memperoleh pendampingan dan pinjaman modal dengan sesudah memperoleh pendampingan dan pinjaman modal dari program P2KP. Dengan indikator yang diukur adalah variabel pendapatan usaha dan variabel simpanan usaha peserta program sebelum dan sesudah program.

5.3.1. Pendapatan usaha

Hasil uji hipotesis menggunakan Uji Tanda Wilcoxon, digunakan untuk menghitung kemaknaan statistik pendapatan usaha peserta program sebelum dan sesudah program ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 5.5
Hasil Uji Hipotesis
Perbedaan Pendapatan Usaha sebelum dan sesudah program

Pendapatan Usaha	Mean±SD	Median	Nilai - Z	Nilai - p
Sebelum	0,8083	0,54254	-6,374	0,000
Sesudah	1,4269	0,77417		

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS

Dari tabel .5.4. di atas terlihat bahwa median pendapatan usaha awal (X_3) sebelum program dan pendapatan usaha akhir (X_3^1) sesudah program adalah sebesar 0,54254 menjadi 0,77417 , hal ini berarti ada peningkatan sampai 42,69 % , dan uji hipotesis menunjukkan kemaknaan pada $\alpha = 0,05$.

Dari hasil pengukuran uji beda program P2KP pada variabel pendapatan usaha berdasarkan Uji Beda Wilcoxon telah terjadi peningkatan pendapatan usaha per bulan yaitu rata – rata Rp. 808.300,00 sebelum program P2KP menjadi rata – rata Rp. 1.426.900,00 per bulan setelah program P2KP, atau setelah program P2KP ada peningkatan pendapatan usaha sebesar 76,53 %. Berdasarkan Uji Beda Wilcoxon, didapatkan nilai $-Z$ sebesar (-6,374) dan nilai - p sebesar $0,000 < 0,05$, yang artinya bahwa pendapatan usaha sebelum dan sesudah program bermakna secara statistik.

5.3.2. Simpanan Usaha

Hasil uji hipotesis menggunakan Uji Beda Wilcoxon, digunakan untuk menghitung kemaknaan statistik simpanan usaha peserta program sebelum dan sesudah perlakuan. Dari hasil pengukuran uji beda program P2KP pada variabel simpanan usaha berdasarkan Uji Beda Wilcoxon, telah terjadi peningkatan yaitu rata – rata dari Rp. 42.390,00 per bulan sebelum program P2KP menjadi rata – rata Rp. 82.760,00 per bulan setelah program P2KP atau setelah program P2KP ada peningkatan simpanan usaha sebesar 95,23 %.

Hasil uji hipotesis menggunakan Uji Tanda Wilcoxon untuk menghitung kemaknaan statistik simpanan usaha sebelum (Y) dan simpanan usaha (Y^1) sesudah program ditampilkan pada tabel .5.5. sebagai berikut :

Tabel 5.6
Hasil Uji Hipotesis
Perbedaan Simpanan Usaha sebelum dan sesudah program

Simpanan Usaha	Mean±SD	Median	Nilai - Z	Nilai – P
Sebelum	0,4239	0,30838	-6.807	0,000
Sesudah	0,8276	0,33466		

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS

Dari tabel di atas terlihat bahwa median simpanan usaha ada peningkatan sebelum dan sesudah program sampai 8,52%, dan uji hipotesis menunjukkan kemaknaan pada $\alpha = 0,05$.

Berdasarkan Uji Peringkat – Bertanda Wilcoxon , didapatkan nilai –Z sebesar - 6.807 dan nilai - p sebesar $0,000 < 0,05$., jadi simpanan usaha sebelum dan sesudah program bermakna secara statistik.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Dari hasil penilaian kinerja Faskel dalam melaksanakan tugas kegiatan pendampingan program P2KP di Kelurahan Puewoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan hasil nilai rata – rata dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Faskel dalam melaksanakan tugas kegiatan pendampingan program P2KP di Kelurahan Puewoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang efektif, yang berarti kegiatan pendampingan yang telah dilakukan oleh Faskel dapat meningkatkan usaha peserta program P2KP .
2. Dari hasil uji korelasi :
 - a. Antara pendampingan dengan pendapatan usaha nilai r masing – masing untuk jenis usaha perdagangan sebesar 0,9879, usaha jasa sebesar 0,9435 dan usaha industri rumah tangga sebesar 0,9932. Jadi kesimpulannya ada hubungan positif antara pendampingan dengan pendapatan usaha, yang artinya semakin efektif kegiatan pendampingan maka semakin besar pendapatan usaha. Sedang nilai koefisien determinasinya (r^2) usaha perdagangan sebesar 0,9759, usaha jasa sebesar 0,8902 dan usaha industri rumah tangga sebesar 0,9864, hal ini berarti varian yang terjadi pada variabel pendampingan dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel pendapatan usaha. atau pendapatan usaha sebesar 98,64%

- ditentukan oleh pendampingan dan 1,36% ditentukan oleh faktor lain diluar penelitian.
- b. Antara pinjaman modal dengan pendapatan usaha menunjukkan bahwa nilai r sebesar 0,9804 untuk usaha perdagangan, usaha jasa sebesar 0,9495 dan usaha industri rumah tangga sebesar 0,9883, yang artinya ada hubungan positif antara pinjaman modal dengan pendapatan usaha. Hal ini berarti semakin besar pinjaman modal maka akan semakin besar pula pinjaman modal.
- c. Antara pendapatan usaha dengan simpanan usaha nilai r masing – masing untuk jenis usaha perdagangan sebesar 0,8791, usaha jasa sebesar 0,9823 dan usaha industri rumah tangga sebesar 0,9927. Jadi kesimpulannya ada hubungan positif antara pendapatan usaha dengan simpanan usaha, yang artinya semakin besar pendapatan usaha maka akan semakin besar pula simpanan usaha. Sedang nilai koefisien determinasinya (r^2) masing – masing 0,7728 untuk usaha perdagangan , 0,9649 untuk usaha jasa dan 0,9855 untuk usaha jasa. Ini berarti bahwa varian yang terjadi pada variabel pendapatan usaha sebesar 98,55% dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel simpanan usaha, atau simpanan usaha sebesar 98,55% ditentukan oleh pendapatan usaha dan 1,45% ditentukan oleh faktor lain diluar penelitian.
- d. Antara pendampingan dengan simpanan usaha nilai r masing – masing untuk jenis usaha perdagangan sebesar 0,9670, usaha jasa sebesar 0,9725 dan usaha industri rumah tangga sebesar 0,9997. Jadi kesimpulannya ada

hubungan positif antara pendampingan dengan simpanan usaha yang artinya semakin efektif kegiatan pendampingan maka semakin besar pula simpanan usaha.

e. Antara pinjaman modal dengan simpanan usaha menunjukkan bahwa nilai r sebesar 0,9493 untuk usaha perdagangan, untuk usaha jasa sebesar 0,9764 dan usaha industri rumah tangga sebesar 0,9989 yang artinya ada hubungan positif antara pinjaman modal dengan simpanan usaha. Hal ini berarti semakin besar pinjaman modal maka akan semakin besar pula simpanan usaha. Sedang nilai koefisien determinasinya (r^2) masing – masing 0,9012 untuk usaha perdagangan , 0,9534 untuk usaha jasa dan 0,9978 untuk usaha jasa. Ini berarti bahwa varian yang terjadi pada variabel pinjaman modal sebesar 95,34% dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel simpanan usaha, atau simpanan usaha sebesar 95,34% ditentukan oleh pinjaman modal dan 4,66% ditentukan oleh faktor lain diluar penelitian.

3. Dari hasil analisis uji beda Wilcoxon :

a. Menunjukkan telah terjadi peningkatan (dalam kurun waktu 6 bulan sebelum dan sesudah program) pendapatan usaha dari rata - rata per bulan sebesar Rp.808.300,- pendapatan usaha awal (X_3) sebelum program menjadi rata – rata per bulan sebesar Rp.1.426.900,- yang berarti meningkat sampai 76,53% per bulan pendapatan usaha akhir (X_3^1) sesudah program.

b. Menunjukkan telah terjadi peningkatan simpanan usaha dari rata - rata per bulan sebesar Rp. 42.390,- simpanan usaha awal (Y) sebelum program menjadi rata – rata per bulan sebesar Rp. 82.760,- meningkat sampai 95,23 % per bulan simpanan usaha akhir (Y¹) sesudah program. Hal ini berarti bahwa Program P2KP telah berhasil meningkatkan kesejahteraan hidup peserta program dan pinjaman dana bergulir program P2KP bermanfaat bagi kelangsungan usaha mereka dimasa yang akan datang.

6.2. Saran

1. Program pendampingan P2KP yang mampu memahami dinamika dan prinsip – prinsip yang berlaku dalam pasar tradisional berpotensi meningkatkan kesejahteraan KSM beserta keluarganya, maka kebijakan pemerintah yang peduli seyogyanya tidak sekedar dalam bentuk pemberian pinjaman modal kerja dengan bunga murah melainkan kemudahan mengakses dan fasilitasi pendampingan usaha.
2. Untuk pendampingan sebaiknya dilakukan secara terus menerus dengan pengkaderan Faskel (pendamping pendampingan) yang memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kegiatan usaha ekonomi produktif sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin dapat terwujud.
3. Perlu diadakan pertemuan seperti lokakarya, saresehan dan apapun bentuknya yang mempertemukan antar kelompok – kelompok KSM sebagai sarana tukar pengalaman dalam pelaksanaan program P2KP. Adanya hal ini akan semakin mampu mengembangkan kelompok – kelompok KSM yang ada di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

6.2.1. Implikasi Kebijakan

Jumlah warga miskin (Gakin) yang belum terjangkau oleh program P2KP diharapkan dapat terjangkau oleh program – program penanggulangan kemiskinan yang lain dengan koordinasi yang baik antara instansi – instansi yang terkait dengan BKM untuk penyaluran dananya agar tidak salah sasaran, sehingga penanggulangan kemiskinan akan dapat semakin cepat tertanggulangi.

6.2.2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Jika ada peneliti lain yang berminat untuk meneliti program P2KP selanjutnya, agar dapat memperoleh informasi gambaran secara menyeluruh maka disarankan untuk melakukan analisis faktor – faktor yang berperan secara utuh dalam usaha meningkatkan pendapatan, seperti faktor manajerial, kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida BR, 2002, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Anonim, 1998, *Panduan Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, Kantor Menteri Negara Kependudukan (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional).
- , 1998, *Petunjuk Pelaksanaan Tabungan Keluarga Sejahtera Bagi Kader*, Jakarta, Kantor Menteri Negara Kependudukan (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional).
- Anto dayan, 1989, *Pengantar Metode Statistik Jilid II*, Jakarta, LP3ES.
- Awan Santosa dkk, 2003, *Jurnal, Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran di Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta*.
- Bappeda Propinsi Jawa Tengah, 1999, *Tingkat Keberhasilan Pemanfaatan Kukesra Bagi Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I Di Wilayah Propinsi Jawa Tengah*, Semarang.
- , 2003, *Gambaran Umum Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Di Propinsi Jawa Tengah*.
- Bappenas, 2003, *Sistim Data dan Penentuan Sasaran (Targeting) dalam Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta.
- Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustapadidjaja, 1988, *Pengantar pemikiran Tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta, Gunung Agung.
- Chamsiah Djamal, dkk, 1994, *Panduan Tenaga Pendamping Lapangan (TPL) Perempuan*, Jakarta, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita.
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 1999, *Manual Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Buku Pedoman Umum*, Jakarta.
- Damodar Gujarati, Alih Bahasa : Sumarno Zain, 1988, *Ekonometrika Dasar*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Herawati, 1998, *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Jakarta, Bumi Aksara.

- Febra Robiyanto,dkk, 2003, *Ekonomi Pembangunan*, Semarang, Studi Nusa.
- Ginanjar Kartasasmita , 1996 , *Pembangunan Untuk Rakyat* , Jakarta, Cidies.
- Gunawan Sumodiningrat, 1997, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, PT. Bina Rena Pariwisata.
- Hendrawan Supratikno, 1992, *Lingkungan Dunia Usaha Indonesia*, Salatiga, Fakultas Ekonomi, UKSW.
- Husein Umar, 1999, *Metode Penelitian Untuk Skripsi, Tesis Bisnis*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Hutagalung, 1964, *Masalah Pembentukan Modal di Negara – negara Yang Sedang Membangun*, Jakarta, Bhratara.
- Hermawan Wasito, 1995, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, APTIK dengan Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan Iqbal, 2003, *Pokok – pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Imam Ghozali, 2003, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP.
- J. Supranto, 2000, *Statistik : Teori Dan Aplikasi*, Jilid I, Jakarta, Erlangga.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta.
- Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2003, *Informasi dasar Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah*, Jakarta.
- Lincoln Arsyad, 1997, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta, STIE YKPN.
- Lembaga Penelitian SMERU, 2001, *Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro, 1997, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- , 2004, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Yogyakarta, UPP AMP, YKPN.
- Muhammad Firdaus, 2004, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*, Jakarta, Bumi Aksara.

- Moh .Nasir, 1983, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Norusis,M.J., 1986, *SPSS/PC+ Advance Statistics*, Chicago.IL, 60611.
- Novianto Wibowo, 2000, *Masalah Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Piet Budiono, 2005, *Pendampingan Perempuan Pedagang Pasar Tradisional Melalui Kredit Mikro*, Semarang, FE UNDIP. (Tidak dipublikasikan, Tesis, Semarang, 2005).
- Pangsa , 2003 , *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.
- Rusli, Said, 1984, *Gerak Penduduk dan Sirkulasi Tenaga Kerja Pedesaan*, Prisma No. 1, Januari 1984 Tahun XII.
- Sadono Sukirno, 2000, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Singgih Santoso, 2004, *SPSS (Statistik Multivariat)*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- SMERU Research Institute, 2001, *Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta.
- Sondang P. Siagian, 1999, *Ekonomi Pembangunan suatu Pengantar*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Soni Sumarsono, 2003 , *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Sugiyono, 1999, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung, CV ALFABETA.
- Suhadi, 2000, *Metodologi Penelitian*, Jakarta,
- Sumadi Suryasubrata, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafika.
- Sumahamijaya.S , 1980, *Membina Sikap Mental Wiraswasta*, Jakarta, Gunung Jati.
- Sumanto,W, 1984, *Sekuncup Ide Operasional, Pendidikan Wiraswasta*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sumitro Djojohadikusumo, 1978, *Undang – Undang Pajak Pendapatan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Triyanto, 2000, *Efektifitas Penggunaan Dana KUKESRA*, Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana. (Tidak Dipublikasikan, Thesis, Salatiga, 2000)

Todaro Michael P, 2000 , *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* , Jakarta, Erlangga.

Tulus Tambunan, 1998, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta, Bumi Aksara.

Wardah Hafidz, 1995, *Tenaga Pendamping Lapangan (TPL) Perempuan : Peran Strategis Namun Marjinal*, Jakarta, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita.

Winardi, 1986, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Bandung, Tarsito.

